

PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Delapan dekade sejak memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia belum sepenuhnya sampai di seberang jembatan emas seperti yang disebutkan Presiden Soekarno. Dalam pidatonya, 1 Juni 1945, ia menyebutkan bahwa pendidikan adalah cermin kehidupan dan cikal bakal keberhasilan bangsa.



Nilai Kejujuran dalam
Budaya Baduy:
**Warisan Leluhur untuk
Karakter Bangsa**



Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

Berdasarkan perspektif agama, sosiologi, dan psikologi (*neuro-science*), kebiasaan adalah elemen kunci dalam membangun karakter dan mencapai kesuksesan. Sejalan dengan pemahaman ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat pada 27 Desember 2024 sebagai langkah strategis untuk membentuk anak-anak Indonesia dengan karakter yang tangguh dan berdaya saing. **Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat meliputi:**



1

BANGUN PAGI

Menanamkan kedisiplinan dan kesiapan menghadapi hari.



2

BERIBADAH

Membentuk pribadi yang memiliki nilai spiritual kuat.



3

BEROLAHRAGA

Mendorong kebugaran fisik dan kesehatan mental.



4

MAKAN SEHAT DAN BERGIZI

Menunjang pertumbuhan dan kecerdasan.



5

GEMAR BELAJAR

Menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas.



6

BERMASYARAKAT

Mengajarkan kepedulian dan tanggung jawab sosial.



7

TIDUR CEPAT

Memastikan kualitas istirahat yang baik.



Dengan membiasakan perilaku positif ini, diharapkan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter yaitu anak yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual, cerdas dan kreatif, serta peduli terhadap lingkungan sosialnya.

Direktorat Sekolah Menengah Atas
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



Direktorat SMA



direktorat.sma



direktoratsma



Direktorat SMA



direktoratsma



www.sma.kemdikbud.go.id

Jembatan Emas Menuju Negeri Cita-Cita

Delapan dekade setelah Indonesia merdeka, pidato Bung Karno di tahun 1945 masih menggema. Ia menyebut kemerdekaan sebagai jembatan emas yang harus diisi dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, hingga kini, jembatan itu belum sepenuhnya tersambung ke negeri cita-cita tempat manusia Indonesia tumbuh cerdas, merdeka, dan berkepribadian luhur.

Sejatinya, sejarah bangsa ini tidak pernah abai terhadap pendidikan. Ki Hajar Dewantara, Dewi Sartika, dan tokoh-tokoh seperti Mohammad Syafei telah menanam benih perlawanan terhadap penjajahan melalui sekolah-sekolah rakyat. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta komunitas Kristen dan Katolik pun bahu-membahu memperjuangkan pendidikan berbasis nilai. Para pendiri bangsa bahkan menjadikan pendidikan sebagai hak konstitusional dalam UUD 1945.

Kini, komitmen itu tetap hidup dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu. Tapi, pada tataran praksis, masih banyak lubang yang harus ditambal. Pendidikan bermutu, seperti dirumuskan UNESCO dan World Bank, tidak hanya soal ruang kelas yang layak dan kurikulum yang canggih. Ia mencakup kualitas guru, proses belajar yang membebaskan, serta hasil belajar yang mencerminkan kecakapan hidup nyata—dari literasi, numerasi, hingga kemampuan berpikir kritis.

Tantangan kita tidak kecil. Kesenjangan mutu pendidikan antara kota dan desa masih lebar. Akses terhadap sekolah, terutama di daerah terpencil, masih jadi kendala. Kurikulum pun belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan zaman. Hafalan masih mendominasi, sementara kreativitas dan daya nalar



belum menjadi panglima. Pelatihan guru terbatas, kesejahteraan mereka timpang, apalagi di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Laporan PISA 2022 memang menunjukkan perbaikan posisi Indonesia, namun posisi kita masih di papan bawah. Ini menunjukkan bahwa hasil belajar belum optimal. Banyak siswa masih kesulitan memahami bacaan panjang atau soal cerita matematika yang kompleks.

Teknologi, yang seharusnya jadi akselerator, justru memperlebar jurang pemisah. Tak semua sekolah punya akses internet memadai. Guru pun banyak yang belum siap memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran.

Pemerintah memang tidak tinggal diam. Melalui Asta Cita dan visi "Pendidikan Bermutu untuk Semua," berbagai program prioritas telah digulirkan. Tapi perjuangan belum boleh surut. Seperti ditegaskan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, pendidikan bukan sekadar penguasaan ilmu, melainkan proses menumbuhkan kepribadian dan peradaban bangsa.

Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, guru, hingga dunia usaha—bersinergi, memperbaiki fondasi pendidikan kita. Sebab di ujung jembatan emas itu, bukan hanya kesejahteraan yang menanti. Tapi harkat, martabat, dan masa depan bangsa.

Salam

daftar isi

EDISI 1 - TAHUN 2025

LAPORAN UTAMA

.06 Pendidikan Bermutu untuk semua
Delapan dekade sejak memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia belum sepenuhnya sampai di seberang jembatan emas seperti pidato Presiden Soekarno, 1 Juni 1945, "Kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Di seberangnya kita harus isi dengan membangun manusia yang berpendidikan, berkarakter, dan berkepribadian,".

.11 Prioritas Memperbaiki Akses, Mutu, dan Tata Kelola
Potret pendidikan Indonesia berdasarkan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan, menunjukkan perlunya upaya perbaikan. Padahal, konstitusi mengamanatkan bahwa pendidikan bermutu merupakan hak semua warga negara.

.18 Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025. Pijakan Awal Penyusunan Kebijakan
Dari forum Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, delapan rekomendasi lahir untuk menjadi pijakan dalam menyusun peta pendidikan dasar dan menengah. Visi besarnya adalah pendidikan berkualitas untuk semua.

.20 PRATIKNO: Pastikan Semua Gerbong Tak Ada yang Tertinggal
Pendidikan adalah lokomotif yang dapat membawa bangsa ini mencapai kemakmuran. Oleh karena itu pendidikan harus menjadi prioritas utama.

KHUSUS

.22 Jarkom "Teman SMA" Lawan Hoaks dan Konten Negatif
22 SMA Maju Bersama Hebat Semua Di tengah derasnya informasi digital, Direktorat SMA tak sekadar menyebar pesan, tapi membangun komunikasi yang utuh melalui Jaringan Komunikasi "Teman SMA".



KHUSUS

.26 Peran Strategis Jarkom SMA

.32 Pendidikan yang Menyehatkan Mental Murid

.34 Filosofi dibalik Wajib Belajar 13 Tahun

SPMB

.28 SPMB : Wujud Pelayanan yang Adil dan Setara

KOLOM

.36 Pembelajaran Mendalam Bukan Sekadar Metode

.40 Belajar Bukan untuk Nilai, Melainkan untuk Kehidupan

AKSARA

.32 Fenomena Judul *Clickbait*, Mainan Kata atau Manipulasi Emosi?

.48 Fenomena Judul *Clickbait*, Mainan Kata atau Manipulasi Emosi?

TEROKA

.32 Nilai Kejujuran dalam Budaya Baduy

OASE

.32 Belajar Keberanian dan Kejujuran dari Muhammad Husni Thamrin



Maju Bersama Hebat Semua

Media Komunikasi Membangun dan Memajukan SMA

Pengarah

Winner Jihad Akbar

Pemimpin Redaksi

Budy Suprpto

Wakil Pemimpin Redaksi

Wulandoro Santoso

Dewan Redaksi

Budy Suprpto, Totok Suprayitno, Purwadi Sutanto, Wahyu Haryadi, Rina Imayanti, Asep Sukmayadi, Irfan Hary Prasetya

Redaktur Pelaksana

Oky Ade Setiawan, Murjiyanto, Retno Aminarsih, Dian Mulyani

Redaksi

Relia Apitafahrurisa, Frisca Ayu Winda, Martin Luter Barus, Zahira Audia Adjani, Aulia Shifa Azzahra, Sofian

Direktorat SMA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan.

021-75911532

publikasi.p sma@kemdikbud.go.id

www.sma.kemdikbud.go.id



Redaksi menerima kiriman artikel/ naskah (maksimal 7.000 karakter), foto (minimal 2 MB), video, atau grafis yang memiliki relevansi dengan pendidikan SMA. Kirim naskah, foto, video ke alamat email publikasi.p sma@kemdikbud.go.id





Pendidikan Bermutu untuk Semua

Komitmen Mencerdaskan Manusia Indonesia

Delapan dekade sejak memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia belum sepenuhnya sampai di seberang jembatan emas seperti yang disebutkan Presiden Soekarno. Dalam pidatonya, 1 Juni 1945, ia menyebutkan bahwa pendidikan adalah cermin kehidupan dan cikal bakal keberhasilan bangsa. “Kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Di seberangnya kita harus isi dengan membangun manusia yang berpendidikan, berkarakter, dan berkepribadian,” ujarnya.

Ikhtiar mencerdaskan manusia Indonesia sudah dimulai jauh sebelum republik ini berdiri. Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa, Mohammad Syafei melalui INS Kayutanam, dan Dewi Sartika melalui Sakola Kautamaan Istri merupakan contoh perlawanan terhadap penjajah kolonial melalui pendidikan.

Selain tokoh-tokoh tersebut, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, juga turut berperan dalam membangun manusia Indonesia. Pun Komunitas Katolik dan Kristen, melakukan hal yang sama dengan cara membangun pendidikan berbasis nilai.

Semua ikhtiar tersebut menjadi bukti bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan, ketika republik ini tengah dipersiapkan, para pendiri bangsa telah sepakat menjadikan pendidikan sebagai hak bagi setiap warga negara melalui Undang-undang Dasar 1945.

Komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang bermutu juga disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa

setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Sebagai hak asasi, negara bertanggungjawab menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan kerangka yang dirumuskan UNESCO melalui *Quality Framework for Education*, tentang bagaimana pendidikan bermutu dijalankan. Secara teoretis, pendidikan bermutu harus mencakup dimensi *input*, proses, dan *output*.

Dimensi *input* merujuk pada sarana prasarana fisik, ketersediaan, dan kualitas tenaga pendidik, hingga kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ruang kelas yang bagus dan disertai fasilitas yang lengkap, tidak cukup tanpa kurikulum yang relevan. Pun kehadiran guru di kelas, tak cukup bila tak dibarengi kemampuan mengajar sesuai kebutuhan murid.

Pada dimensi proses, interaksi antara murid dan guru menjadi kunci. Di sinilah metode mengajar diuji, pendekatan pembelajaran dipilih, dan relasi manusia terbentuk. Aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menjadi bagian yang juga menentukan dalam mewujudkan



ABDUL MU'TI
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen)

pendidikan bermutu. Idealnya, pada bagian ini, guru harus mampu mendorong muridnya berpikir kritis dan kreatif, ketimbang menjejali mereka dengan hafalan.

Pada bagian *output*, hasil belajar murid bukan dilihat melalui rapor dengan deretan angka semata. Hasil belajar tak hanya kemampuan kognitif, tapi juga keterampilan sosial, seperti kemampuan berkolaborasi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata.

Pandangan ini sejalan dengan yang ditegaskan oleh The World Bank. Mereka menyebut bahwa pendidikan yang bermutu melahirkan murid yang melek literasi dan numerasi. Dua kemampuan ini menjadi bekal murid untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu bernalar, mengkritisi, dan memecahkan masalah nyata.

TANTANGAN PENDIDIKAN INDONESIA

Membangun manusia Indonesia seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa, tentu bukan pekerjaan mudah. Terlebih jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, bukan saja panjang, melainkan juga banyak tikungan dan tidak rata.

Melihat fakta di lapangan, tantangan pendidikan di Indonesia terbilang kompleks. Mulai dari aspek

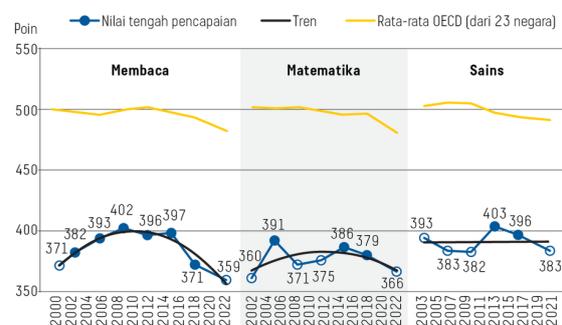
kualitas, akses, kurikulum, hingga kesejahteraan guru. Tidak hanya itu, ketersediaan infrastruktur, teknologi, dan pengelolaan pendidikan, juga masih menjadi bagian dari masalah yang belum sepenuhnya tuntas.

Dari aspek kualitas, pendidikan di Indonesia masih belum lepas dari masalah pemerataan. Terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, serta antar pulau. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki guru dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang di pedesaan dan daerah terpencil serta tertinggal.

Di beberapa daerah, jumlah dan kualitas guru serta fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium belum memadai. Akibat ketimpangan ini, hasil belajar murid tidak optimal. Hal itu ditunjukkan dengan masih banyaknya murid yang kesulitan dalam membaca, menulis, dan memahami konsep-konsep dasar.

Soal ini dapat terlihat dari hasil pengukuran kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia yang dilakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang menunjukkan angka di bawah rata-rata dunia.

Tren Pencapaian dalam Membaca, Matematika, dan Sains



Titik putih menunjukkan estimasi pencapaian rata-rata yang secara statistik tidak signifikan di atas/di bawah estimasi PISA 2022.
Garis hitam menunjukkan tren yang paling sesuai.

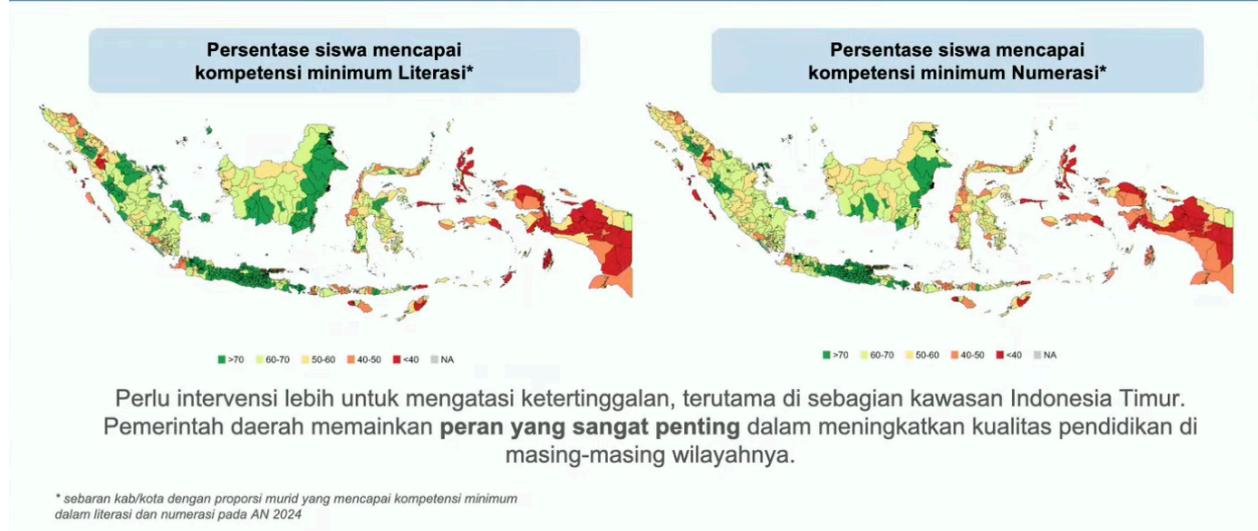
Sumber: OECD, PISA 2022 Database

INFOGRAFIK: ANDRI

Laporan PISA 2022 menyebutkan, capaian hasil belajar murid Indonesia memang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018. Posisinya naik lima hingga enam peringkat dalam membaca, matematika, dan sains. Peringkat Indonesia dalam literasi membaca berada di urutan ke-66 dari 81



Kesenjangan kualitas hasil belajar antarwilayah juga menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama (*contoh berdasarkan AN SMP/MTs, 2024*)



negara, matematika hanya di posisi ke-70, dan sains ke-68. Itu artinya, masih banyak murid di Indonesia yang kesulitan memahami bacaan panjang atau menyelesaikan soal cerita matematika yang kompleks.

Tantangan berikutnya adalah ketimpangan akses. Keterbatasan infrastruktur, jarak rumah ke sekolah yang jauh, dan biaya pendidikan yang mahal, menjadi faktor yang menghambat sebagian anak-anak terutama yang berasal dari keluarga miskin, kesulitan untuk bersekolah. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah. Di beberapa daerah, jumlah SMA hanya satu dalam radius puluhan kilometer. Guru pengampu sering merangkap dua hingga tiga mata pelajaran.

Menghadirkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman, juga masih menjadi tantangan. Murid lebih banyak dituntut untuk menghafal banyak materi, namun belum dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah.

Laporan *The Global Education Monitoring Report* dari UNESCO, merekomendasikan Indonesia untuk memperkuat pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal agar lebih relevan dan efektif.

Upaya untuk terus meningkatkan mutu guru juga masih menghadapi tantangan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan guru menjadi penghambat

upaya meningkatkan kualitas pengajaran. Hal ini menjadi penyebab belum meratanya mutu guru di Indonesia.

Sebagai pilar penting pendidikan, kesejahteraan guru, terutama di daerah terpencil masih menjadi persoalan. Hal ini menjadi salah satu penyebab motivasi dan kualitas pengajaran guru belum optimal.

Selain aspek kualitas, akses, kurikulum, dan kesejahteraan guru, pendidikan Indonesia juga menghadapi tantangan zaman. Era digital memunculkan tantangan yang disebabkan kesenjangan akses teknologi. Faktanya, tidak setiap sekolah sudah memiliki akses yang memadai ke teknologi informasi dan komunikasi. Dari sisi kesiapan guru, juga menunjukkan bahwa guru masih perlu dibekali kemampuan mengajar dengan menggunakan teknologi. Selain dua hal tersebut, keamanan data dan potensi ketergantungan pada teknologi menuntut kesiapan pemangku kebijakan untuk membangun sistem keamanan data, sekaligus pendidikan mengenai etika penggunaan teknologi.

Indonesia sebaiknya memperkuat pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal agar lebih relevan dan efektif.



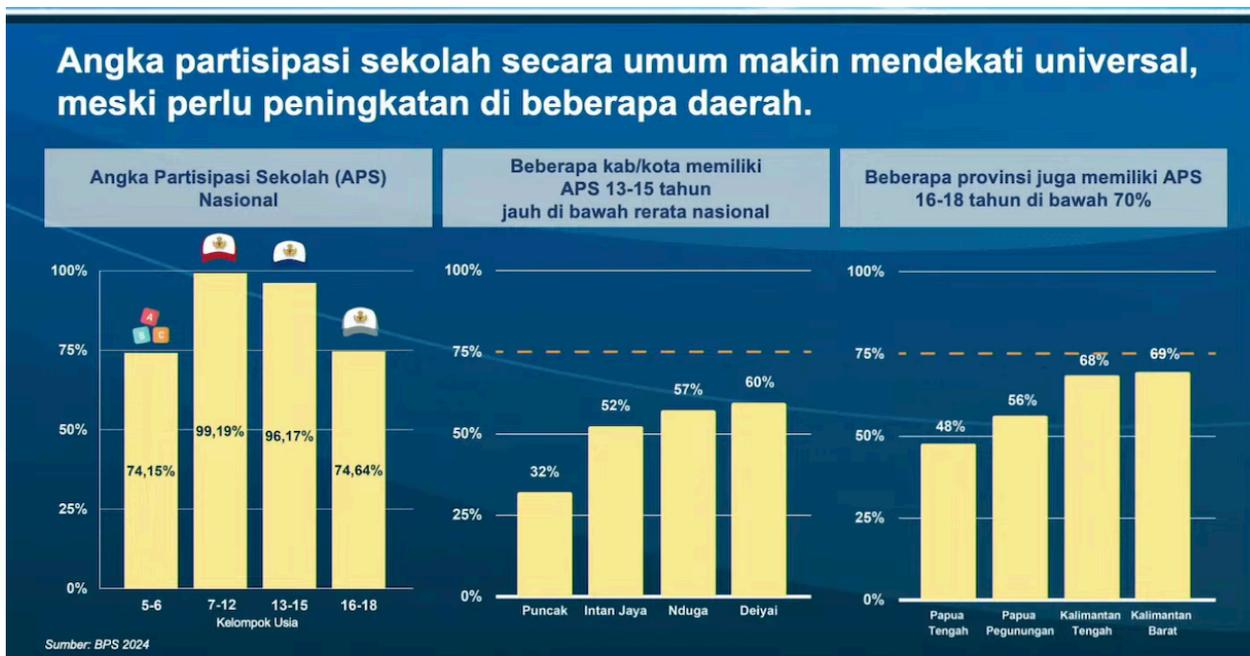
Untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan di Indonesia, pemerintah mesti bersinergi dengan semua pihak terkait. Upaya pemerataan kualitas, peningkatan akses, peningkatan mutu guru, dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan perlu menjadi prioritas.

Komitmen bersama ini menjadi sangat penting, karena seperti ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, pendidikan pada hakikatnya adalah proses membangun kepribadian, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan meraih kesejahteraan.

Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Atas dasar ini, kebijakan pemerintah melalui Asta Cita ke-empat yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional merupakan wujud komitmen pemerintah mencerdaskan manusia Indonesia.



Melalui visi tersebut, pemerintah menjadikan pendidikan sebagai penopang utama keadilan sosial, sarana memutus rantai kemiskinan, sekaligus pintu masuk peradaban baru. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, Kemendikdasmen menggulirkan berbagai program prioritas untuk mewujudkan Visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. | *AR08





Prioritas Memperbaiki Akses, Mutu, dan Tata Kelola

Potret pendidikan Indonesia berdasarkan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan, menunjukkan perlunya upaya perbaikan. Padahal, konstitusi mengamanatkan bahwa pendidikan bermutu merupakan hak semua warga negara.

Berdasarkan landasan konstitusional, kondisi realistis pendidikan di Indonesia, dan pertimbangan tantangan masa depan, Kemendikdasmen menjalankan program prioritas sebagai upaya menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Program-program tersebut merupakan penerjemahan dari Asta Cita.

Program-program prioritas Kemendikdasmen di antaranya adalah, wajib belajar 13 tahun, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta kesejahteraan guru, kemudian penguatan pendidikan karakter, penguatan pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi, pengembangan talenta dan prestasi, serta pembangunan kebahasaan dan kesusastraan.

Wajib belajar 13 tahun merupakan program prioritas Kemendikdasmen untuk memperluas dan memperkuat pemerataan kesempatan pendidikan. Program ini juga termasuk afirmasi pendidikan oleh masyarakat, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD, serta fasilitasi relawan mengajar

Program ini dilatarbelakangi angka putus sekolah jenjang jenjang smp dan sma yang masih tinggi. "Ada yang menyebut angka sekitar 4 juta yang tidak tamat SMP dan SMA, sehingga indikator lama usia sekolah kita masih rendah, "kata Abdul Mu'ti.

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen tahun 2024, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SMA/ sederajat baru mencapai 70.74.

Data ini selaras dengan data Susenas KOR yang menyebutkan



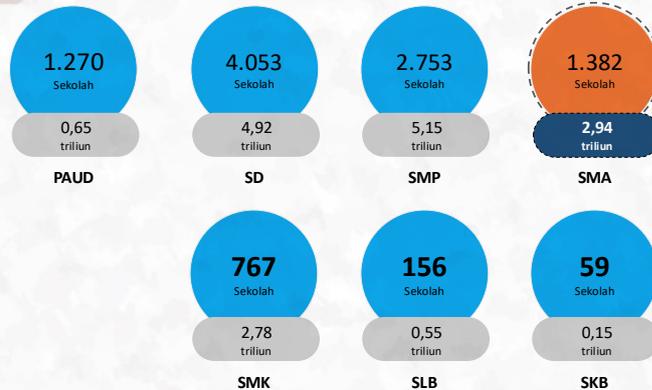
Sebaran Sasaran Revitalisasi Sekolah Tahun 2025

Total Anggaran

17,15 Triliun untuk **10.440** satuan pendidikan dengan proporsi sasaran Revitalisasi **78% negeri** dan **22% swasta**.

Sasaran Revitalisasi merata pada seluruh pemerintah daerah yang menerima alokasi DAK Fisik pada tahun 2025.

Dari 1.382 SMA sasaran Revitalisasi, terdapat **sasaran USB sebanyak 20** SMA dan sasaran Revitalisasi sebanyak **1.362 SMA**.



bahwa angka partisipasi sekolah (APS) pada kelompok usia 16-18 tahun selalu menjadi yang terendah. Lebih dari 20 persen lulusan SMP/ sederajat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/ sederajat

Program prioritas berikutnya berkaitan dengan pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Terkait program ini, Kemendikdasmen membuat kebijakan revitalisasi sekolah. Kebijakan ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintahan saat ini. Kemendikdasmen menargetkan akan melaksanakan revitalisasi untuk 10.440 sekolah. Program yang akan dimulai Juli 2025 ini, seperti disampaikan Abdul Mu'ti, juga akan dibarengi dengan program digitalisasi pembelajaran melalui penyelenggaraan *smart classroom*.

"Program ini, kata Abdul Mu'ti akan dilaksanakan secara bertahap. Kami rencanakan dalam masa sekitar 3 atau 4 tahun semuanya dapat dipenuhi dengan 300.000 unit smart TV untuk mendukung pembelajaran di sekolah-sekolah itu," ujarnya.

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta kesejahteraan guru, juga menjadi salah satu dari program prioritas Kemendikdasmen. Kemendikdasmen akan memberikan pelatihan kepada pada guru, termasuk pelatihan bimbingan konseling. Rencananya, tahun 2025 akan ada sebanyak 806.00 guru yang mendapatkan pelatihan.

Selain peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, Kemendikdasmen juga berupaya untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan guru. Langkah ini dimulai dengan memfasilitasi

Program Unggulan dan Prioritas Pemerintah Tahun 2025

Asta Cita ke-4

Memperkuat **pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan**, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Program Prioritas Kemendikdasmen Penerjemahan Asta Cita

1. Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
2. Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru
3. Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
4. Pengembangan Talenta dan Prestasi
5. Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
6. Penguatan Karakter: 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat & Pagi Ceria
7. Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial
8. Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
9. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang Berkeadilan
10. Penguatan Karakter: Pelatihan Guru BK dan Ke-BK-an
11. Tes Kemampuan Akademik (TKA)
12. Penguatan Pendidikan Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi





Pelaksanaan kebijakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini telah diamanatkan melalui surat edaran bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

redistribusi guru ASN pada sekolah swasta. Terkait dengan hal ini, Kemendikdasmen memiliki data yang menunjukkan terdapat 110.000 guru swasta yang telah lulus seleksi guru ASN P3K dan ditempatkan di sekolah negeri. Hal ini menyebabkan kekurangan guru pada sekolah swasta.

"Melalui Permendikbud nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, guru ASN atau PNS dan P3K dapat didistribusikan pada satuan pendidikan swasta," ujarnya.

Redistribusi ini mempertimbangkan kebutuhan guru pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Redistribusi dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali lagi. Sekolah swasta yang menerima redistribusi guru ASN tetap melakukan upaya pemenuhan guru pada sekolahnya.

Kemendikdasmen juga mengubah sistem pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah menjadi lebih sederhana, mudah, dan bermakna. Pengisian kinerja guru dilakukan satu kali dalam setahun. Dokumen administrasi mendapat verifikasi secara langsung dari atasan dan pengembangan kompetensi berbasis refleksi diri.

Komitmen terhadap pemerataan pendidikan nasional juga diwujudkan melalui kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ditetapkan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, kebijakan itu dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak





Kemendikdasmen akan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang memuliakan agar tercipta suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.



Indonesia termasuk dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang adil, berkualitas, dan tanpa diskriminasi. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari sistem PPDB hasil masukan dari para kepala daerah, para pengambil kebijakan dan masyarakat.

Sebagai bagian dari penguatan karakter, Kemendikdasmen menggulirkan beberapa program di antaranya memberikan pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, peningkatan kompetensi guru BK dan agama, pengangkatan guru BK, penanaman tujuh kebiasaan anak Indonesia.

Kebijakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat, program Pagi Ceria yang meliputi Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH), menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pelaksanaan kebijakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini telah diamanatkan melalui surat edaran bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pendekatan pembelajaran yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan literasi membaca dan numerasi murid di Indonesia. Rendahnya pencapaian hasil pembelajaran ini salah satunya karena kesenjangan

efektivitas pembelajaran antar sekolah dan antar daerah di Indonesia.

Kesenjangan tersebut disebabkan banyak faktor, di antaranya proses pembelajaran yang dilakukan guru masih menggunakan pendekatan tradisional. Pembelajaran yang didominasi ceramah satu arah, asesmen yang mengandalkan hafalan. Ketidaksiapan murid untuk belajar, dan proses pembelajaran yang tidak menumbuhkan kemampuan kreativitas dan berpikir kritis murid memunculkan fenomena bersekolah tetapi tidak belajar.

Untuk mengatasi kesenjangan efektivitas pembelajaran sekaligus memberikan kesempatan luas pada guru untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis anak didik mereka, Kemendikdasmen menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau *deep learning*.

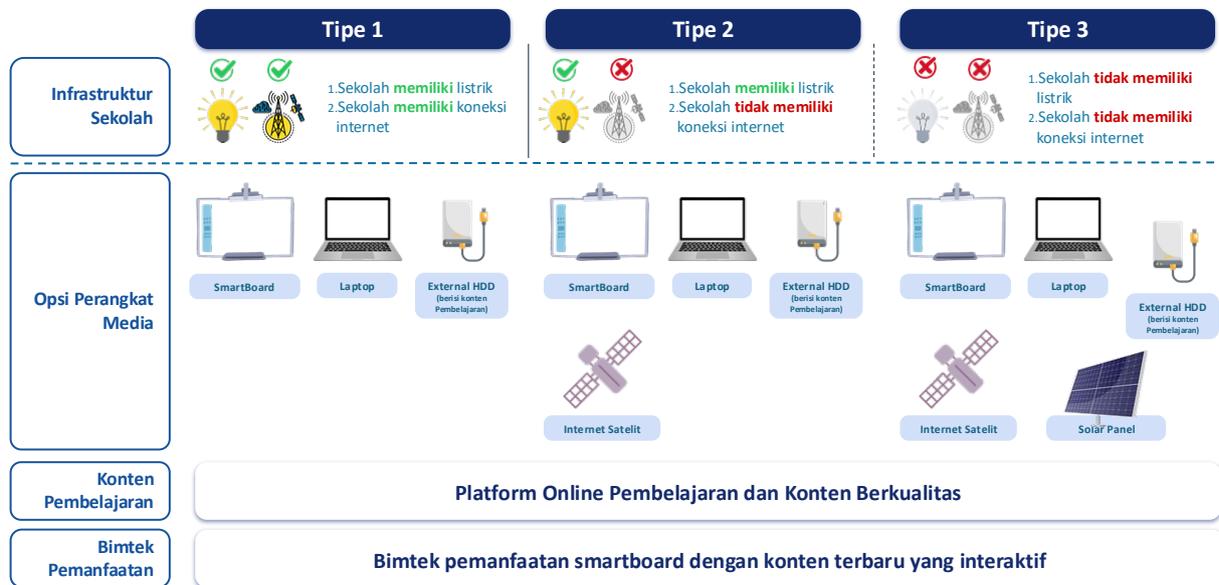
Pembelajaran Mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu.

Program prioritas lainnya adalah mempersiapkan generasi Indonesia yang melek teknologi. Untuk mewujudkan program ini, Kemendikdasmen akan mengenalkan Pelajaran *coding* dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kompetensi literasi digital,





Skema Pelaksanaan Digitalisasi Pembelajaran Berdasarkan Kondisi Sekolah



meningkatkan kemampuan berpikir komputasional, meningkatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial secara produktif dan bertanggung jawab.

Opsi pembelajarannya sebagai mata pelajaran pilihan kelas 5 dan 6 SD, SMP, dan SMK atau SMA. Pembelajaran ini juga terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada dan juga sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Untuk mewujudkan program ini, Kemendikdasmen telah menyelesaikan naskah akademik dan saat ini akan segera melakukan pelatihan untuk para guru.

"Beberapa lembaga sangat berminat untuk bermitra dengan Kemendikdasmen. Salah satunya Google yang menyatakan siap melatih sekurang-kurangnya 1 juta guru untuk *e coding* dan *artificial intelligence*," ungkap Abdul Mu'ti.

Memperkuat dan menyempurnakan sistem evaluasi yang merangsang upaya belajar, merupakan program prioritas berikutnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, Kemendikdasmen melakukan transformasi kebijakan evaluasi belajar yang disebut dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yaitu pengukuran capaian akademik murid yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) pada mata pelajaran tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik, tes ini diselenggarakan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tiga prinsip, yaitu kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas.

Ada empat tujuan tes kemampuan akademik. Pertama, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas; dan keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Kemendikdasmen seperti disampaikan Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, menerapkan beberapa strategi yakni partisipasi semesta dengan melibatkan berbagai mitra.

Mitra yang dimaksud, tambah dia, adalah pemerintah baik pusat, provinsi, kota, kecamatan, desa, RT dan RW. Lalu, masyarakat yang terdiri atas orang tua dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian, mitra pembangunan seperti komunitas dan lembaga swasta. Serta, dunia usaha yakni pihak eksternal yang memiliki kesamaan visi untuk turut serta membangun sektor pendidikan dalam bentuk program *corporate sosial responsibility* (CSR).

Terkait dengan peran pemerintah daerah, Atip menyebutkan, Pemda memiliki peran strategis





dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing wilayahnya. Kewenangan Pemda dalam pengelolaan pendidikan bahkan sudah diatur melalui Undang-Undang 23 tahun 2014. Undang-undang tersebut mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kemudian untuk pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak, pendidikan dasar dan SSD dan SMP.

Saat ini tercatat ada 38 pemerintah provinsi dan 514 pemerintah kabupaten kota yang merupakan pengampu dari 51 juta murid, 3,4 juta guru, 440.000 satuan pendidikan. Sebanyak 48 persen dari Rp724,2 triliun anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2025 juga ditransfer langsung ke daerah.

Selain transfer anggaran, Kemendikdasmen juga menyediakan rapor pendidikan untuk membantu pemda dan sekolah memantau capaian pendidikan dan melakukan perencanaan program yang lebih terarah. Melalui rapor pendidikan. Pemda juga dapat memantau dan merencanakan pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan. Melalui peran penting ini, Pemda menjadi bagian yang turut mendorong partisipasi semesta demi menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua.

Komponen Pembelajaran Mendalam

1

DIMENSI PROFIL LULUSAN

- Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- Kewargaan,
- Penalaran kritis,
- Kreativitas,
- Kolaborasi,
- Kemandirian,
- Kesehatan,
- Komunikasi.

2

PRINSIP PEMBELAJARAN

- Berkesadaran (*mindful*),
- Bermakna (*meaningful*),
- Menggembirakan (*joyful*).

3

PENGALAMAN BELAJAR

- Memahami,
- Mengaplikasi,
- Merefleksi.

4

KERANGKA PEMBELAJARAN

- Praktik pedagogis,
- Lingkungan pembelajaran,
- Kemitraan pembelajaran,
- Pemanfaatan teknologi digital.



MUTU

Capaian literasi dan numerasi terus meningkat pada jenjang SD, SMP, dan SM. Namun, masih harus kita percepat!

Sekolah Dasar

| 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53,4% | 61,5% | 68,8% |
| 6 dari 10 murid | 7 dari 10 murid | 7 dari 10 murid |

mencapai tingkat kompetensi minimum dalam literasi

| 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30,7% | 46,7% | 60,4% |
| 4 dari 10 murid | 5 dari 10 murid | 7 dari 10 murid |

mencapai tingkat kompetensi minimum dalam numerasi

Sekolah Menengah Pertama

| 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 51,4% | 59,5% | 64,5% |
| 6 dari 10 murid | 6 dari 10 murid | 7 dari 10 murid |

mencapai tingkat kompetensi minimum dalam literasi

| 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36,8% | 40,8% | 60,6% |
| 4 dari 10 murid | 5 dari 10 murid | 7 dari 10 murid |

mencapai tingkat kompetensi minimum dalam numerasi

Sekolah Menengah Atas

| 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 59,2% | 56,1% | 70,3% |
| 6 dari 10 murid | 6 dari 10 murid | 8 dari 10 murid |

mencapai tingkat kompetensi minimum dalam literasi

| 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30,7% | 46,7% | 60,4% |
| 4 dari 10 murid | 5 dari 10 murid | 7 dari 10 murid |

mencapai tingkat kompetensi minimum dalam numerasi

Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2023

- Sejak tahun 2021, proporsi peserta didik yang melampaui kompetensi minimum terus meningkat
- Peningkatan terjadi secara masif khususnya dalam numerasi (peningkatan hingga mencapai 14-29%)





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029

RPJMN 2025–2029 adalah penjabaran tahap pertama dari RPJPN 2025–2045. Dokumen ini disusun oleh Bappenas dan memuat program-program prioritas pemerintah selama 5 tahun pemerintahan.



RPJMN ini menjadi rujukan utama penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, termasuk Direktorat SMA di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025

Pijakan Awal Penyusunan Kebijakan

Dari forum Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, delapan rekomendasi lahir untuk menjadi pijakan dalam menyusun peta pendidikan dasar dan menengah. Visi besarnya adalah pendidikan berkualitas untuk semua.



Di sebuah kompleks pelatihan sumber daya manusia di Depok, para pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai penjuru negeri berkumpul. Mereka datang membawa catatan, kegelisahan, dan harapan. Selama tiga hari, mulai 29 April 2025, suara-suara dari ruang kelas, kantor dinas, dan balai-balai bahasa disatukan dalam forum Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah.

Forum ini bukan sekadar ajang seremonial atau rutinitas tahunan. Ia menjadi arena awal penyusunan kebijakan jangka menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk periode 2025–2029.

Menteri Abdul Mu'ti menyebutnya sebagai batu loncatan menuju implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan Asta Cita pertama dan keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat karakter.

Dari forum ini, delapan komisi menyampaikan delapan rekomendasi strategis. Komisi 1, yang diwakili Emy Rosana Saleh dari Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara, menyoroti tiga persoalan utama yaitu akses pendidikan di wilayah tertinggal, peningkatan mutu guru, dan penanganan anak putus sekolah. "Masih banyak kecamatan tanpa satuan pendidikan.



Ini harus segera diatasi,” kata Emy.

Masalah tata kelola pendidikan dibahas tuntas oleh Komisi 2 yang diwakili Taufiq Mursad dari Dinas Pendidikan Gowa. Komisi 2 mendorong agar Dapodik—basis data pendidikan nasional yang telah diverifikasi dan divalidasi—diposisikan sebagai rujukan tunggal dalam perencanaan pembangunan dan revitalisasi sekolah.

Urusan penerimaan peserta didik baru menjadi bahasan Komisi 3. Maryam dari Serdang Bedagai menyarankan penguncian Dapodik pada saat pengumuman kuota penerimaan untuk menjamin transparansi. Ia juga mengusulkan kerja sama dengan sekolah swasta terakreditasi guna menampung kelebihan calon siswa.

Dari Lombok Tengah, NTB, datang cerita soal praktik pemanfaatan rapor pendidikan. Katman dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTB menjelaskan bagaimana daerahnya memetakan kualitas pembelajaran dan merancang intervensi kebijakan berbasis data. Rekomendasi ini menjadi laporan Komisi 4.

Lalu Komisi 5 berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Usman dari Buol, Sulawesi Tengah, mencatat peran lembaga seperti SEAMEO, Asosiasi Guru Matematika Indonesia, dan Komunitas Guru Belajar Nusantara. Ketiganya aktif menggelar pelatihan yang terhubung dengan Balai Guru di Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Isu pendidikan jarak jauh (PJJ) menjadi bahasan dalam Komisi 6 yang diwakili Pujianto dari Dinas Pendidikan Sorong mengusulkan agar PJJ diadopsi

sebagai kebijakan nasional mulai 2026. Syaratnya: sistemnya harus terstruktur, interaktif, dan didukung oleh guru-guru kompeten.

Sedangkan Komisi 7 mengangkat urgensi pendidikan karakter. Melalui wakilnya, Sutarmo dari Surakarta mendesak percepatan regulasi daerah serta sinergi empat pilar pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Menurutnya, karakter tak cukup diajarkan, tapi perlu dikuatkan bersama.

Terakhir, Komisi 8 menyoroti pentingnya literasi bahasa dan sastra. Herawati dari Balai Bahasa Jawa Barat mendorong integrasi literasi dalam Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan, serta pelibatan balai bahasa dalam distribusi buku bacaan berkualitas ke sekolah-sekolah.

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi tak berhenti sebagai dokumen, tetapi akan dibawa ke meja perumusan kebijakan. Forum ini, katanya, memiliki semangat dan visi yang sama: menjadikan pendidikan sebagai kunci masa depan Indonesia. “Indonesia masa depan bisa kita wujudkan melalui pendidikan yang bermutu,” ujarnya.

Semangat itulah yang menjelma menjadi tagar kolektif #PendidikanBermutuUntukSemua. Sebuah seruan yang bukan hanya bersifat slogan, tapi refleksi dari kesadaran bahwa pendidikan bukan milik segelintir, melainkan hak seluruh anak bangsa. Visi ini pun berpijak kuat pada dasar hukum: dari Pembukaan UUD 1945 hingga Perpres terbaru tentang RPJMN 2025–2029.



Pratikno

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

Sebagian anak Indonesia sudah melompat ke abad 25, sementara sebagian lain masih tertinggal di stasiun abad 20. Inilah potret timpang pendidikan Indonesia. Di satu sisi dituntut bersaing di panggung global, di sisi lain masih berkebutuhan dengan kebutuhan paling dasar. Di tengah tantangan disrupsi teknologi, tugas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bukan sekadar jadi lokomotif—melainkan menarik seluruh gerbong agar tak ada yang tertinggal dari perjalanan menuju masa depan.

Gambaran itu barangkali menjadi latar batin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat memberikan sambutan pada Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025.

Menurutnya, pendidikan adalah lokomotif yang

Pastikan Semua Gerbong Tak Ada yang Tertinggal

Pendidikan adalah lokomotif yang dapat membawa bangsa ini mencapai kemakmuran. Oleh karena itu pendidikan harus menjadi prioritas utama.

dapat membawa bangsa ini mencapai kemakmuran. Fakta menunjukkan, keberhasilan negara-negara maju bukan karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Keberhasilan mereka lebih banyak didorong oleh faktor kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, investasi dalam pendidikan dan penelitian, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kalau kita lihat dari semua data komparatif dunia, negara-negara yang maju adalah negara yang justru bukan negara yang kaya sumber daya alam, melainkan negara yang kuat sumber daya manusianya," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam teori pembangunan, kekayaan alam berupa minyak, mineral, dan lahan subur tak otomatis menjadi jaminan kemajuan. Hal ini sering disebut sebagai kutukan—resource curse—yakni keadaan di mana negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam justru stagnan, rapuh, bahkan mundur karena terlalu bergantung pada hasil bumi dan lalai membangun manusianya.

Fenomena ini bukan isapan jempol. Dalam banyak studi, salah satunya oleh Hua-Ping Sun, dkk (2018) serta Hilmawan dan Clark (2019), dijelaskan bahwa negara yang terlalu bergantung pada kekayaan alam justru abai terhadap investasi





pendidikan dan kapasitas manusianya. Penelitian Bagaskara dan Dahlan (2024) juga menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Pratikno menggambarkan kementerian dan lembaga sebagai satu rangkaian kereta api, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) adalah lokomotifnya. Di belakangnya ada gerbong-gerbong panjang yang di dalamnya terdapat murid, guru, sekolah, komunitas belajar, dan pemerintah daerah. Tantangan terbesar bukan sekadar membuat lokomotif melaju cepat, melainkan memastikan semua gerbong ikut bergerak bersama tanpa ada yang tertinggal.

Di sinilah pentingnya inklusivitas, aksesibilitas, dan kualitas. Tiga hal inilah yang menurut Pratikno menjadi inti dari persoalan pendidikan Indonesia saat ini. Masih banyak anak yang tidak mendapat akses pendidikan yang layak karena alasan geografis, ekonomi, atau sosial. Ketimpangan infrastruktur dan distribusi guru juga menambah panjang daftar pekerjaan rumah bangsa ini.

Di sisi lain, anak-anak Indonesia yang berhasil menembus sekolah terbaik dan fasilitas digital mutakhir menghadapi tantangan berbeda. Mereka hidup di dunia teknologi yang terus bergerak cepat. Belajar dengan internet, kecerdasan buatan (AI), dan aplikasi canggih. Tapi apakah semua itu mendukung tumbuhnya nalar kritis dan karakter yang kuat? Belum tentu. Skor PISA terbaru menunjukkan bahwa capaian literasi, numerasi, dan sains pelajar Indonesia masih berada di bawah rerata negara-negara OECD. Bahkan, tren skornya menurun dibanding edisi sebelumnya. Itu artinya, bukan hanya akses dan fasilitas yang penting, melainkan juga kualitas isi pembelajaran dan kemampuan berpikir murid-murid juga menjadi hal mendesak untuk diperbaiki.

Kemajuan teknologi, lanjut Pratikno membuat banyak hal menjadi lebih mudah, tapi sekaligus membuat banyak hal menjadi rumit. Ia bercerita bagaimana AI mampu menjawab pertanyaan kompleks dengan sangat sistematis dan tajam. Tapi AI juga menjadi bias, manipulatif, dan bergantung pada data yang bisa saja tidak netral. Karena itu, pendidikan harus didesain agar dapat membangun nalar. Guru harus mengajarkan murid dapat berpikir



kritis, bukan hanya menghafal jawaban. Murid perlu dibekali kemampuan memilah dan memilih informasi, bukan sekadar menelan mentah-mentah apa yang muncul di layar.

Dalam konteks ini, sistem pendidikan Indonesia harus didesain agar mampu memenuhi tantangan zaman. Murid tidak harus dijejali dengan tes dan nilai, tetapi mempercayakan pendidikan kepada guru yang betul-betul kompeten. Guru harus lulus seleksi ketat, bergelar master, dan punya pelatihan pedagogi yang mendalam. Mereka dibayar layak, dihormati, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Sehingga diharapkan hasilnya bukan hanya kualitas tinggi, melainkan juga pemerataan—tidak ada sekolah dengan label unggulan karena semua sekolah memiliki keunggulan dan kekhasannya masing-masing.

Pemerintah saat ini memiliki program untuk membangun manusia Indonesia. Program itu di antaranya revitalisasi sekolah, sekolah unggul Garuda, digitalisasi pembelajaran, hingga Sekolah Rakyat. "Semua ikhtiar ini tidak akan berjalan jika hanya dikerjakan oleh pusat. Butuh konsolidasi antar-kementerian dan konsolidasi ke daerah-daerah," kata Pratikno.

Pratikno mengakui, semua ikhtiar itu memiliki tantangan yang tidak ringan, namun juga bukan perkara mustahil. Lokomotif pendidikan Indonesia memang berat jalannya, relnya panjang, dan gerbongnya banyak. Tapi selama semua terhubung dalam satu rangkaian dan tidak ada yang tertinggal, Indonesia akan sampai ke tujuan. Tujuan itu adalah manusia Indonesia yang utuh—cerdas, berkarakter, adaptif, dan mampu berkontribusi pada zamannya.

| *AR08



Jarkom “Teman SMA”

Lawan Hoaks dan Konten Negatif

Di tengah derasya informasi digital, Direktorat SMA tak sekadar menyebarkan pesan, tapi membangun komunikasi yang utuh melalui Jaringan Komunikasi “Teman SMA”.

Era digital adalah paradoks. Di satu sisi menawarkan kecepatan, tetapi di sisi lain sering mengabaikan keakuratan. Informasi dapat melesat dalam hitungan detik, namun tak jarang disertai kabar bohong, menimbulkan salah tafsir, bahkan miskomunikasi yang merugikan.

Dalam situasi seperti ini, Direktorat SMA membangun Jaringan Komunikasi “Teman SMA”. Sebuah simpul yang mencoba menjembatani komunikasi dari pusat ke daerah, dari pejabat ke kepala sekolah, dari aturan ke ruang kelas.

“Jarkom merupakan inovasi yang menyatukan berbagai elemen pendidikan ke dalam satu

ekosistem pendidikan,” kata Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Jarkom SMA di Jakarta, awal 2025.

Sejak dibentuk empat tahun silam, Jarkom menjadi wajah komunikasi pendidikan jenjang SMA. Bukan hanya platform digital, melainkan sebuah manajemen komunikasi yang dirancang kolektif dan sistematis.

Jaringan Komunikasi “Teman SMA” melibatkan para pemangku kepentingan bidang pendidikan, mulai dinas pendidikan daerah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), guru, humas daerah, dan masyarakat. Semua terlibat dalam kerja komunikasi yang berorientasi pada pemahaman, bukan sekadar penyampaian pesan.

Kehadiran Jarkom bukan hanya untuk menyampaikan kebijakan, tapi juga menyiapkan mitigasi komunikasi. Sejak 2023, Jarkom mulai menyusun rencana kerja berbasis masalah nyata di lapangan. Berbagai masalah klasik yang kerap





muncul, seperti penerimaan murid baru hingga mispersepsi atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, kerap terjadi akibat kurang efektifnya komunikasi antara pusat, daerah, dan masyarakat.

Dalam situasi seperti inilah, Jarkom SMA bergerak untuk menyuarakan informasi secara utuh sehingga mencegah dampak kerusakan meluas. "Kita harus mengakui masih ada kebijakan pusat yang tidak sampai secara utuh ke masyarakat. Kalau pun sampai, seringkali dipahami berbeda," ungkap Jihad.

Dalam praktiknya, Jarkom bertugas mengurai kebijakan menjadi bahasa yang bisa dipahami para pemangku kebijakan di daerah dan juga masyarakat. Melalui Jarkom, setiap informasi dapat disebarluaskan hingga daerah-daerah yang selama ini sulit terjangkau atau tidak selalu dapat terhubung dengan cepat.



Untuk mewujudkan hal ini, Jarkom Teman SMA tidak hanya mengandalkan teknologi, karena desain thinking dan empati adalah fondasi kerja Jarkom. Setiap anggota Jarkom dituntut memahami siapa penerima informasi, bagaimana konteks sosial dan kulturalnya, serta memilih strategi komunikasi yang tepat. Pendekatan ini menuntut kecakapan komunikasi sekaligus juga harus menguasai substansi pendidikan.

Untuk membekali para anggota Jarkom Teman SMA, pada Rakor Jarkom tahun 2025 ini, para peserta mendapatkan penguatan dan pembekalan materi terkait kompetensi komunikasi publik dan kebijakan Kemendikdasmen yang disampaikan narasumber ahli dan para ketua tim kerja di Direktorat SMA.



Peserta Rakor Jarkom juga berlatih menyusun strategi komunikasi penanganan krisis dan agenda setting communication. Mereka berlatih membuat peta isu, menyusun narasi publik, dan memitigasi risiko informasi. Tujuannya bukan hanya menjaga citra, tetapi memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dipahami dan tidak terdistorsi.

"Di era ini, kecepatan bukan jaminan kepercayaan. Yang penting adalah kejelasan dan kedalaman informasi," ujar Purwadi Sutanto, Widyaprada Ahli Utama Kemendikdasmen.

Ia menyebut Jarkom sebagai sistem pertahanan informasi. Menurutnya, selama ini pusat sering mengira informasi sudah sampai ke bawah, padahal hanya berhenti di tengah jalan. Koordinasi antara pusat dan daerah, atau antara pemda dan sekolah, kerap terputus karena tidak adanya sistem komunikasi yang terstruktur. "Jarkom adalah cara kita membangun komunikasi yang utuh dan terjaga," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa zaman digital menyimpan jebakan yakni informasi yang datang terlalu deras dan tak terkendali. Di sinilah Jarkom memainkan peran sebagai filter, memastikan informasi tidak meleset sasaran. "Jarkom bukan sekadar tim komunikasi. Ia adalah mesin sosial yang merawat ekosistem pendidikan. Sebuah jaringan yang terus tumbuh dan belajar," ujarnya.

Seiring waktu, Jarkom membuktikan bahwa komunikasi bukan pekerjaan satu arah. Ia adalah





relasi yang dibangun dengan empati dan kecakapan. Dan relasi itu, jika dikelola dengan baik, mampu melahirkan kepercayaan.

Maka ketika peserta pelatihan Jarkom dari berbagai provinsi duduk dalam satu ruangan, mereka bukan sekadar perwakilan institusi. Mereka adalah penjaga pesan pendidikan. Mereka adalah pelayan informasi yang bekerja agar tak ada lagi kebijakan yang salah diterima, atau sekolah yang kebingungan menafsirkan aturan.

“Marilah jadikan Jarkom sebagai wadah untuk terus menebar kebaikan,” seru Purwadi menutup pelatihan tahun ini. Pesan itu sederhana, namun menggambarkan makna dari kerja komunikasi yang sejati: menghadirkan kebijakan bukan sebagai beban, tapi sebagai panggilan bersama.

Dirjen PAUD Dikdasmen, GOGOT SUHARWOTO Jarkom harus RAMAH

Setiap detik, jutaan konten baru mengalir bebas di ruang digital. Namun, tak semua membawa kebaikan. Menurut Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara rutin memfilter konten-konten tersebut. Hasilnya, dari sekitar dua juta konten yang disaring, sebanyak 86 persen merupakan konten negatif, dari perjudian hingga pornografi.

Di tengah gempuran ini, Jaringan Komunikasi SMA (Jarkom) tampil sebagai pagar informasi. Ia tak hanya menyampaikan pesan, tapi juga memastikan pesan itu sampai kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat.

“AI bisa menjawab pertanyaan apa saja, tapi ia tidak tahu kepada siapa harus menjawab,” ujar Gogot. Menurutnya, teknologi secanggih apa pun tak akan mampu menggantikan peran manusia sebagai penilai konteks. Salah sasaran dalam menyampaikan informasi bisa membuat dunia kacau.

Di sinilah urgensi Jarkom. Ia bukan sekadar corong, tapi penilai, penyaring, dan penuntun. Dalam teori komunikasi, pesan baru menjadi komunikasi jika ada pengirim, pesan, dan penerima. Tapi di internet, informasi sering kehilangan arah karena bersifat satu arah, tak terukur, dan kadang tak bermakna.

Jarkom hadir membawa filosofi pelayanan yang sejalan dengan prinsip layanan di Kemendikdasmen

yaitu responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Dengan prinsip ini, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan, tapi menciptakan hubungan.

Apalagi yang dilayani adalah Generasi Net. Mereka tumbuh dalam ruang yang serba digital, mencintai komunikasi dua arah, dan menyukai pesan yang mencerminkan identitas mereka. “Desain komunikasi yang normatif tidak akan menyentuh mereka,” kata Gogot.

Karena itu, Jarkom perlu lentur. Ia harus memahami konteks budaya dan bahasa lokal. Ia harus berani meninggalkan bentuk komunikasi yang seragam, dan tampil dengan wajah-wajah berbeda di tiap daerah.

Rakor Jarkom menjadi forum yang menghidupkan semangat itu. Tempat bertukar strategi, bertukar cara, bertukar semangat. Karena melawan hoaks dan konten negatif di dunia digital tak cukup dengan satu pendekatan. Diperlukan pasukan yang tahu bagaimana bicara dengan bahasa mudah dipahami.

GOGOT SUHARWOTO
Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen





Kuasai Komunikasi, Bentuk Persepsi

Reputasi pemerintah bisa hancur bukan karena kebijakan yang buruk, melainkan komunikasi yang tak terjaga.

Satu cuitan yang salah tafsir bisa merusak kepercayaan publik. Sebaliknya, satu narasi yang tepat waktu dan menyentuh, akan menuai dukungan dan menggerakkan publik untuk berpartisipasi. Di ruang yang penuh gema ini, komunikasi bukan hanya urusan kata, melainkan bagaimana membentuk persepsi.

"Di era disrupsi informasi dan media sosial, urgensi komunikasi publik semakin tinggi karena persepsi bisa terbentuk hanya dalam hitungan menit," ujar Ma'ruf El Rumi, Staf Khusus Mendikdasmen.

Pemerintah tak bisa lagi mengandalkan pidato formal atau siaran pers yang kaku. Di tengah banjir informasi dan lautan opini di media sosial, persepsi publik dibentuk bukan oleh fakta semata, melainkan oleh narasi. Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi urat nadi dari legitimasi pemerintah.

Ma'ruf mencontohkan, catatan rapor hijau yang disematkan berbagai lembaga survey publik kepada Kemendikdasmen. Berdasarkan catatan, nama Abdul Mu'ti muncul sebagai salah satu menteri dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi. Lembaga seperti CELIOS, Litbang Kompas, LSI Denny JA, Lembaga Survei Nasional, dan Indikator Politik Indonesia mencatat citra positif, kinerja memuaskan, hingga kepuasan publik yang menyentuh angka 88,1 persen. Tapi semua itu tak terjadi secara kebetulan. Di baliknya, ada strategi komunikasi yang dirancang rapi, dan dijalankan dengan disiplin.

Strategi itu disusun dalam pendekatan yang disebut Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, Intervensi, Mitigasi. "Kami tidak ingin publik hanya tahu, tapi juga paham, mendukung, dan akhirnya ikut serta dalam kebijakan pendidikan," kata Ma'ruf

Menurutnya, komunikasi publik bukan sekadar memberi tahu, melainkan mengajak masyarakat turut menghidupi kebijakan. Pada praktiknya, sosialisasi dijalankan untuk mengenalkan dan membentuk pemahaman. Informasi diberikan secara berkala agar masyarakat

tidak merasa gelap. Intervensi dilakukan jika terjadi krisis atau kesalahpahaman yang membesar. Sementara mitigasi disiapkan sebagai langkah preventif agar kebijakan tidak ditarik ke ruang konflik yang tak perlu.

Ma'ruf menekankan pentingnya respons cepat dalam situasi krisis komunikasi. "Kalau persepsi negatif menyebar dalam waktu tiga jam, maka kita harus mampu merespons dalam satu jam pertama. Di situlah kredibilitas dipertaruhkan," ujarnya.

Namun strategi sebaik apa pun tak akan berarti jika gagal memahami kunci utamanya yaitu persepsi. Persepsi adalah cara masyarakat memahami realitas, yang dibentuk oleh pengalaman, simbol, emosi, dan tentu saja komunikasi. Ketika komunikasi tak selaras atau tidak konsisten, maka yang terbentuk adalah kebingungan dan ketidakpercayaan.

Komunikasi membentuk persepsi. Persepsi membentuk opini. Opini memengaruhi sikap dan tindakan. Maka, siapa yang mampu mengelola komunikasi, pada dasarnya sedang mengelola makna dan tindakan publik.

Kemendikdasmen, sejauh ini, dinilai berhasil menjaga narasi. Program rehabilitasi sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru menjadi contoh konkret. Dua program itu bukan hanya ditanggap sebagai kebijakan teknis, tapi sebagai simbol keseriusan pemerintah membenahi pendidikan. Ini adalah hasil dari komunikasi yang menyentuh emosi, bukan sekadar logika.

"Komunikasi publik bukan hanya soal memberi tahu, melainkan membangun hubungan dua arah untuk menciptakan perubahan kolektif. Dan itu hanya bisa terjadi jika masyarakat ikut serta," ujar Ma'ruf.

Dalam dunia yang digerakkan oleh persepsi, pemerintah tak cukup hanya benar tapi juga harus mampu merangkai kata-kata dengan cermat, disampaikan dengan empati, dan dijaga konsistensinya. Karena di era digital, persepsi sering kali lebih menentukan ketimbang kenyataan. "Setiap isu harus dijawab bukan hanya dengan data, melainkan juga dengan narasi yang mampu menjelaskan arah dan niat kebijakan," ujarnya.



MA'RUF EL RUMI
Staf Khusus Mendikdasmen



Peran Strategis Jarkom SMA



**Winner
Jihad Akbar**

DIREKTUR SMA

**Jarkom bukan
sekadar corong.
Jarkom adalah
sebuah gerakan
untuk menyuarakan
visi, hati, dan pikiran
untuk perbaikan
mutu pendidikan.**

// Jaringan komunikasi (Jarkom) SMA adalah mata, telinga, dan denyut nadi komunikasi Direktorat SMA," kata Direktur SMA Winner Jihad Akbar pada Rakor Jarkom, 10 – 13 Juni 2025 di Jakarta.

Fungsinya yang strategis, menjadikan Jarkom SMA bukan semata corong untuk menyuarakan kebijakan melainkan jembatan penghubung antara pusat dengan masyarakat.

"Jarkom bukan saluran satu arah, melainkan sebuah ekosistem yang memastikan pesan dapat tersampaikan sesuai target," ujarnya.





Jarkom SMA dibentuk oleh Direktorat SMA dengan melibatkan humas dinas pendidikan provinsi, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

"Selama empat tahun terakhir, Jarkom SMA menjadi ekosistem komunikasi yang memainkan peran strategis dalam membangun kepercayaan publik," ujar Direktur.

Tak dimungkiri, kehadiran Jarkom sebagai sebuah ekosistem komunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi komunikasi Direktorat SMA. Hal ini menjadi salah satu alasan, mengapa Rapat Koordinasi Jaringan Komunikasi SMA tahun 2025 kembali diselenggarakan. Selain untuk melakukan evaluasi, kegiatan ini juga sekaligus untuk memperkuat Tim Jarkom, terutama untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang semakin besar.

Tahun 2025, seperti disampaikan Jihad, Tim Jarkom SMA memiliki lima isu utama yang harus disuarakan bersama. **Pertama** adalah bagaimana menangkal hoaks dan miskonsepsi yang tengah membanjiri ruang digital. Dua "penyakit" komunikasi ini harus dilawan dengan menggunakan konten edukatif dan naratif.

Kedua, adalah bagaimana mengomunikasikan program strategis Kemendikdasmen kepada masyarakat. Saat ini ada delapan program prioritas Kemendikdasmen yang harus disuarakan melalui konten naratif yang sesuai dengan target yang ingin disasar. **Ketiga**, bagaimana meningkatkan kualitas konten kreatif dengan mengoptimalkan berbagai platform visual dan berbasis cerita atau *storytelling*, sehingga lebih manusiawi dan dapat diterima siswa dan masyarakat.

Keempat adalah membangun kepercayaan publik dengan menyajikan komunikasi yang transparan dan responsif. Dan **kelima** adalah bagaimana meningkatkan literasi digital pegawai dan juga masyarakat, serta memperkuat kolaborasi dengan tim komunikasi di sekolah-sekolah, khususnya jenjang SMA di seluruh Indonesia.

Ini bukan pekerjaan mudah. Perubahan zaman menuntut perubahan strategi komunikasi. Generasi yang dilayani saat ini adalah generasi *digital native*.

Mereka terbiasa hidup di tengah *real time interaction* dan mendapatkan informasi dari banyak sumber yang terkadang sulit untuk dipilah kebenarannya. Dalam kondisi seperti inilah, media bukan hanya pelengkap, melainkan platform penting untuk menyampaikan visi dan misi sebuah kebijakan.

Narasi kebijakan Direktorat SMA harus disampaikan dengan pendekatan *visual thinking*. Dengan cara inilah, proses transformasi dapat berjalan lebih mulus. Dalam era disrupsi, jika media dibiarkan bebas diisi oleh informasi yang tak sesuai, maka informasi tentang visi dan kebijakan yang tengah diterapkan juga dapat diselewengkan.

"Saatnya kita naik kelas dari komunikasi yang informatif menjadi komunikasi yang transformatif. Dalam proses tersebut, Tim Jarkom harus belajar untuk lebih kreatif, lebih dekat, dan lebih luas jangkauannya," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Tim Jarkom harus berani menerapkan strategi komunikasi semacam *above the line* dan *below the line*. Pada ranah *above the line*, Jarkom dapat menggunakan media massa, televisi, radio, dan platform resmi untuk menyampaikan visi dan kebijakan yang lebih luas dan luas jangkauannya.

Sementara *below the line*, pendekatan yang diterapkan lebih manusiawi dan lebih personal. Misalnya pertemuan langsung, diskusi, workshop, dan kegiatan akar rumput, sehingga pesan yang disampaikan lebih menyentuh hati sehingga lebih mudah diterima.

Selain itu, Tim Jarkom juga harus lebih mengoptimalkan pemberdayaan media kreatif seperti *TikTok*, *Instagram*, *YouTube*, dan *podcast*. Dalam penggunaannya, media-media tersebut tidak hanya untuk menyampaikan informasi satu arah, tapi juga dialog dan mencari umpan balik. Dalam proses tersebut, peran influencer, Duta SMA, siswa unggulan, alumni yang sukses, dan para guru yang punya pengaruh di media turut diberi ruang untuk bergotong royong menyampaikan visi dan misi perbaikan mutu pendidikan.

"Tujuan utamakita adalah bagaimana menjangkau, membuka, dan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama memajukan pendidikan," ujarnya.

SPMB



Wujudkan Pelayanan yang Adil dan Setara

Kemendikdasmen menegaskan komitmennya memberikan layanan pendidikan yang adil dan setara melalui kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai sistem nasional melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Tentu tak hanya mengganti istilah, kebijakan itu dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, termasuk dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang adil, berkualitas, dan tanpa diskriminasi.

Menerapkan prinsip digitalisasi, SPMB menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan terintegrasi sambil tetap memberikan layanan luring di daerah yang membutuhkan. Sistem ini menetapkan empat jalur utama untuk jenjang SMA/SMK yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Masing-masing jalur menggunakan proses seleksi yang terukur untuk memenuhi latar belakang calon murid yang beragam di Indonesia.

Namun, peraturan SPMB ini memberikan pengecualian untuk sekolah kerja sama, luar negeri, pendidikan khusus/layanan khusus, berasrama, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dan wilayah dengan jumlah anak usia sekolah terbatas. Pada prinsipnya SPMB ini bertujuan memberi kesempatan yang adil dan akses pendidikan berkualitas, meningkatkan layanan bagi anak dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, mendorong prestasi murid, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penerimaan.

Penataan ulang penerimaan murid dengan memperkuat sistem data melalui integrasi dengan Dapodik. Untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan

hasil seleksi, semua data pendaftar dikunci secara real-time dan tidak dapat diubah secara sepihak. Selain itu, sistem ini menghindari praktik manipulatif yang sering menjadi perdebatan saat melaksanakan penerimaan murid baru.

Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, terlihat semangat pelaksanaan SPMB secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. SPMB merupakan proses penting dalam sistem pendidikan nasional, dimana proses ini ditujukan untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik secara adil dan merata. Oleh karenanya, setiap instansi penyelenggara pendidikan dan pemerintah pusat maupun daerah perlu berkomitmen dan konsisten menerapkan prinsip ini demi mewujudkan sistem pendidikan yang berintegritas, adil dan tanpa diskriminasi.

Kementerian mengatur seluruh jalur penerimaan murid baru dengan kuota minimal 30 persen untuk domisili, 30 persen untuk afirmasi, 30 persen untuk prestasi, dan maksimal 5 persen untuk mutasi. Tujuan penetapan kuota ini adalah untuk memprioritaskan murid yang berasal dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Ini termasuk murid yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, penyandang disabilitas, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai guru atau yang dipindahkan karena pekerjaan.

Dengan filosofi "Pendidikan Bermutu untuk Semua", kebijakan SPMB memprioritaskan akses



berbasis domisili agar anak bisa sekolah di satuan pendidikan terdekat dari tempat tinggalnya. Namun lebih dari itu, SPMB juga memperhatikan kelompok masyarakat kurang mampu dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) melalui fleksibilitas kebijakan di tingkat daerah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya soal akses, tapi juga mutu yang merata. Ia menambahkan, pendidikan adalah hak konstitusional semua warga negara. "SPMB memastikan bahwa tidak hanya akses pendidikan yang terbuka, tetapi juga kualitas layanan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi," ujar Atip.

Wamen juga menegaskan, SPMB juga memastikan sekolah-sekolah yang tersedia benar-benar berkualitas. Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif memutakhirkan data satuan pendidikan sebagai basis kebijakan penerimaan yang adil.

"SPMB adalah bentuk keadilan dalam sistem. Pemerintah daerah harus mengawal tidak hanya distribusi sekolah, tapi juga jaminan mutu dari setiap sekolah yang ada di wilayahnya," ujarnya.

SPMB merupakan reformasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan murid baru. Cakupan kebijakan ini mencakup pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi siswa, integrasi teknologi, dan pemberian kewenangan fleksibel bagi daerah. Dengan pendekatan tersebut, SPMB diharapkan dapat

menjawab tantangan pendidikan Indonesia yang kompleks, baik dari sisi geografis, kondisi sosial, maupun ketersediaan fasilitas.

Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Gogot Suharwoto, menyebut SPMB sejalan dengan upaya digitalisasi pendidikan dan penguatan tata kelola berbasis data. Kebijakan SPMB menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi sistem pendidikan Indonesia. SPMB tidak hanya mempermudah proses pendaftaran, tapi lebih jauh, menjadi alat distribusi keadilan pendidikan terutama bagi anak-anak dari kelompok rentan. "SPMB bukan hanya siapa yang diterima, tapi bagaimana semua anak punya peluang yang sama untuk belajar di sekolah yang baik," ujarnya.

DIGITALISASI LAYANAN

Supatmi, 41 tahun, salah satu orang tua murid di Purwakarta, menyebutkan, tahun ini anaknya mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik dan itu bisa dilakukan secara mandiri. "Meskipun di awal terjadi gangguan, tapi proses selanjutnya cukup lancar," ungkapnya. Sementara itu, Madi, 39 tahun mengatakan bahwa anaknya mendaftar melalui jalur afirmasi, karena ada kesempatan dan memenuhi syarat untuk masuk melalui jalur itu.

Dari segi teknis pelaksanaan SPMB tahun ini banyak mengalami perbaikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ragil Bima, Koordinator Operator SPMB SMAN 1 Nganjuk, Jawa Timur. Salah satu inovasi yang banyak diapresiasi masyarakat adalah



penerbitan PIN digital, yang digunakan untuk membuka akses pendaftaran. Beberapa daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta, telah menjalankan sistem ini dengan pendekatan hybrid yakni memadukan layanan online dan bantuan layanan offline di sekolah.

Kesiapan sekolah dalam pelaksanaan SPMB tidak hanya menyangkut teknis administratif, tetapi juga soal kesiapan emosional dan relasional. Banyak kepala sekolah membentuk tim khusus untuk menangani verifikasi, konsultasi, dan pendampingan orang tua yang mengalami kesulitan teknis dalam proses daring. Kepala SMAN 100 Jakarta Gusniar Tamba, menyebutkan, SPMB bukan sekadar tentang menerima data, melainkan menerima anak-anak ini sebagai bagian dari keluarga besar sekolah.

Selain menyediakan posko informasi, sekolah juga menyiapkan personal khusus yang ditugasi membantu masyarakat mengakses sistem online, mengunggah dokumen, dan memeriksa kelengkapan berkas. Hal ini penting, mengingat masih banyak keluarga yang belum memiliki literasi digital tinggi.

Gusniar memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara transparan dan akuntabel. Untuk itulah, jauh hari sebelum pelaksanaan, pihaknya melakukan sosialisasi kepada warga sekitar yang memiliki anak lulusan SMP, menampilkan paparan tentang proses SPMB yang dijalankan. Kedua hal tersebut memungkinkan proses SPMB ini bisa dipantau oleh siapapun, sehingga transparansi dan akuntabilitasnya lebih terjamin.

Pelaksanaan SPMB juga melibatkan lintas sektor. Di banyak daerah, sekolah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data kependudukan calon murid, terutama pada jalur afirmasi. Kolaborasi ini membuat proses lebih lancar dan mencegah praktik manipulasi dokumen. Di Jakarta, misalnya, koordinasi antara sekolah, Disdik, dan Dukcapil berlangsung setiap hari selama masa SPMB. Data yang masuk dari jalur afirmasi diperiksa ulang melalui NIK dan sistem DTKS secara real-time.

Dalam jalur prestasi, kesiapan sekolah juga diuji dalam melakukan validasi sertifikat dan surat keputusan dari sekolah asal. Guru-guru pembimbing di SMA tujuan bekerja ekstra untuk mengecek keabsahan bukti prestasi, dari tingkat

kabupaten hingga nasional. Ini menunjukkan bahwa sekolah tidak sekadar menerima berkas, tetapi turut menjaga integritas sistem.

Di Jakarta, seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana, Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta telah menyiapkan posko layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang tersebar di seluruh wilayah administratif Jakarta. Posko SPMB hadir untuk memberikan layanan informasi lengkap dan gratis terkait seluruh proses seleksi. Layanan ini bisa diakses secara daring ataupun luring.

Untuk pelayanan secara daring, calon murid dapat menghubungi nomor telepon atau media sosial resmi untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan bila ingin pelayanan secara luring, terdapat dua posko SPMB di setiap wilayah/kota administrasi Jakarta. Untuk penanganan lebih lanjut yang tidak bisa dapat diselesaikan di tingkat wilayah, tersedia Posko Layanan SPMB Provinsi DKI Jakarta di Gedung Dinas Pendidikan Lantai 5.

Posko ini memberikan layanan informasi terkait alur pendaftaran, bantuan teknis, dan penanganan pengaduan bagi calon siswa dan orang tua yang membutuhkan. Selain itu, seluruh sekolah negeri di Jakarta juga difungsikan sebagai posko SPMB untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.

Pada 2025, tambah Nahdiana, Dinas Pendidikan juga melaksanakan Penerimaan Murid Bersama (PMB Bersama) yang sebelumnya dikenal sebagai PPDB Bersama. Tahun ini melibatkan 138 SMP swasta dengan daya tampung 1.626 murid baru, 121 SMA swasta dengan daya tampung 1.761 murid baru, dan 145 SMK swasta dengan daya tampung 2.785 murid baru.

Namun di balik semua kesiapan itu, tantangan tetap ada. Beberapa sekolah di wilayah perdesaan masih kesulitan dalam jaringan internet dan perangkat. Di tempat-tempat seperti ini, sekolah menjadi garda depan yang menjembatani digitalisasi dengan pelayanan manual. Bahkan dibuka posko pelayanan agar dapat melayani para pendaftar dengan sebaik-baiknya.

SPMB juga mendorong inklusi yang lebih luas. Melalui jalur afirmasi, anak-anak dari keluarga pra-sejahtera kini memiliki peluang yang lebih adil untuk menempuh pendidikan menengah atas berkualitas. Jalur prestasi pun membuka ruang





penghargaan tidak hanya bagi nilai akademik, tetapi juga untuk pencapaian non-akademik yang relevan dan dibuktikan secara sah. Tak kalah penting, sistem mutasi memberikan penghargaan terhadap mobilitas pekerjaan orang tua, khususnya ASN, TNI/Polri, dan tenaga pendidik.

MEMBANGUN SISTEM YANG MENDIDIK

Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto menegaskan, pelaksanaan SPMB bukan dalam rangka menyeleksi murid untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit, melainkan untuk memastikan mereka masuk ke sekolah yang dekat dengan domisilinya masing-masing. Terkait masih adanya persepsi mengenai sekolah favorit, ia menambahkan jika pemerintah saat ini menargetkan revitalisasi 10.400 bangunan sekolah dan melakukan sertifikasi kepada guru-guru. Hal tersebut sebagai upaya agar sarana dan prasarana, serta kualitas layanan setiap sekolah menjadi seimbang.

SPMB bukan sekadar pergantian nama dari PPDB, melainkan sebuah paradigma baru dalam pelayanan pendidikan. Sistem ini mendorong pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk bergotong royong menghadirkan akses pendidikan yang lebih baik.

Tentu masih ada ruang untuk perbaikan,

seperti perluasan layanan daring yang lebih inklusif dan distribusi informasi yang lebih masif hingga ke pelosok.

Namun secara keseluruhan, SPMB telah menunjukkan, perubahan dapat dimulai dari sistem yang tertib, bersih, dan ramah terhadap kebutuhan semua warga. Bahwa dengan pendekatan digital yang tepat dan dukungan lapangan yang kuat, pendidikan dapat benar-benar hadir sebagai hak, bukan sekadar peluang.

Sebagaimana disampaikan Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, SPMB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan asas berkeadilan. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan di sekolah negeri, di saat yang sama kami akan melibatkan dan membantu peningkatan sekolah swasta yang telah berkontribusi memajukan pendidikan Indonesia. |



Perubahan Kuota Jalur SPMB

(Persentase kuota setiap jenjang harus memenuhi 100%)

| | Jalur | PPDB | SPMB |
|---|----------|------------|----------|
|  SD | Domisili | Min. 70% | Tetap |
| | Afirmasi | Min. 15% | Tetap |
| | Prestasi | Tidak Ada | Tetap |
| | Mutasi | Maks. 5% | Tetap |
|  SMP | Domisili | Min. 50% | Min. 40% |
| | Afirmasi | Min. 15% | Min. 20% |
| | Prestasi | Sisa Kuota | Min. 25% |
| | Mutasi | Maks. 5% | Tetap |
|  SMA | Domisili | Min. 50% | Min. 30% |
| | Afirmasi | Min. 15% | Min. 30% |
| | Prestasi | Sisa Kuota | Min. 30% |
| | Mutasi | Maks. 5% | Tetap |

Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk SMK (Seleksi mempertimbangkan: Rapor/Prestasi/Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian) **Prioritas:**

- Calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu & penyandang disabilitas (min. 15%).
- Calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah (max. 10%).

Dikarenakan masih terdapat sejumlah kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri, maka SPMB Jenjang SMA dilaksanakan dengan **Sistem Rayonisasi** dengan ketentuan:

- Ditetapkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
- Rayon ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.





PENDIDIKAN YANG MENYEHATKAN MENTAL MURID



Pendidikan yang menyetatkan mental murid adalah pendidikan yang memanusiakan proses belajar. Di dalam ruang kelas yang sehat secara mental, murid tidak merasa takut untuk bertanya, tidak cemas apabila salah, dan tidak malu apabila belum paham.

Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan di Indonesia telah meletakkan beban besar di pundak murid-muridnya. Pendidikan dibuat dengan sistem yang ketat, kurikulum padat, dan budaya kompetisi yang menempatkan nilai menjadi ukuran utama keberhasilan. Di balik semua itu, ada sisi yang nyaris tidak diperhatikan, yaitu

kesehatan mental murid.

Sebagian dari orangtua, guru, masyarakat, dan Teman SMA boleh jadi sudah pasrah menerima keadaan ini karena terlalu lama menyaksikan dan bahkan merasakan ketika sekolah hanya cukup memberi ilmu pengetahuan. Padahal yang dibutuhkan anak-anak jauh lebih dari sekadar ilmu pengetahuan, melainkan karakter yang tangguh.

Pendidikan yang menyetatkan mental murid adalah pendidikan yang memanusiakan proses belajar. Ini bukan tentang bagaimana proses belajar mengajar menjadi serba mudah. Justru sebaliknya, tentang menciptakan ruang belajar yang menantang namun tetap aman, yang mendorong namun tetap memahami, dan yang membimbing tanpa menekan. Di dalam ruang kelas yang sehat secara mental, murid tidak merasa takut untuk bertanya, tidak cemas apabila salah, dan tidak malu apabila belum paham.

Namun dalam praktik sehari-hari, masih banyak murid ketika pulang sekolah dengan wajah lesu

Belakangan novel-novel di Indonesia banyak mengangkat terkait tema kesehatan mental. Tema yang diangkat dalam novel-novel ini tidak serta merta lahir dari imajinasi seorang penulis, melainkan hasil dari observasi realitas remaja hari ini. Katakanlah novel "Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati" karya Brian Khrisna yang begitu viral di tik-tok, hingga per 5 Juni sudah 33 kali cetak. Ini sebuah angka yang fantastis, pasalnya buku ini baru dicetak Januari 2025.

Bukan hanya buku karya Brian Krisna, di tahun 2024 novel berjudul "Rumah untuk Alie" karya Lenn Liu menjadi bahan perbincangan. Bahkan novel ini juga diangkat pada layar lebar. Kedua novel tersebut dapat menjadi cermin realitas hari ini yang banyak mengalami kesehatan mental. Tidak terkecuali murid-murid SMA.

Bila melihat praktik di negara-negara yang disebut memiliki sistem pendidikan yang baik, sekolah yang ideal adalah tempat anak-anak bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan bahagia. Akan tetapi kenyataan di negeri ini, sekolah sering kali menjadi tempat menegangkan untuk para murid. Banyak murid bangun pagi bukan disertai senyum dan semangat, melainkan dengan rasa cemas, takut nilai jelek, dan takut tidak sesuai harapan orang tua.





dan pikiran lelah. Tekanan akademik yang terus-menerus, ditambah ekspektasi sosial yang tinggi, sering membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Mereka belajar bukan karena ingin tahu, melainkan karena takut tertinggal. Mereka menjawab soal bukan karena memahami, tetapi karena takut dianggap bodoh.

Kesehatan mental murid tidak bisa dikawal oleh seorang guru bimbingan konseling semata, melainkan oleh ekosistem dalam satuan pendidikan, pun orang tua. Sekolah harus mendukung kesejahteraan psikologis murid. Hal ini bukan tugas tambahan untuk guru maupun sekolah, melainkan bagian utama dari proses pendidikan itu sendiri.

Guru dapat memulai dari hal sederhana, memperlakukan murid bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai manusia yang sedang belajar memahami dunia dan dirinya. Ketika guru menunjukkan empati, memberi ruang dialog, dan tidak memberi label "bodoh" atau "malas", saat itulah kesehatan mental murid mulai terjaga. Orang tua berhenti membandingkan anaknya dengan anak yang lain, saat itu pula beban tidak terlihat di hati seorang anak.

Pendidikan sekarang memberi angin segar karena membuka ruang bagi pembelajaran yang lebih kontekstual, eksploratif, dan sesuai minat. Akan tetapi, kurikulum yang baik hanya akan

bermakna apabila diiringi perubahan cara berpikir dan cara mendidik. Pendidikan yang menyetatkan mental bukan soal modul atau metode, tetapi soal bagaimana kita memperlakukan murid dalam proses belajar mengajar, membuat murid merasa cukup, merasa berarti, dan merasa didukung, dan nyaman.

Murid tidak hanya belajar dari buku. Mereka belajar dari cara guru menatap mereka, dari nada suara saat dimarahi, dari ekspresi wajah ketika mereka gagal menjawab. Murid belajar dari bagaimana kita memberi ruang kepada mereka untuk tumbuh, bukan hanya untuk lulus.

Karena itu, pendidikan yang menyetatkan mental murid bukanlah kemewahan, melainkan keharusan yang lahir dari seorang guru yang tulus dalam mendidik.

Murid yang tenang, percaya diri, dan merasa aman akan lebih terbuka menerima pelajaran, lebih siap menghadapi tantangan, dan lebih mampu menemukan makna dari proses belajar itu sendiri.

Inilah yang kemudian akan menjadikan generasi emas Indonesia tahun 2045.

Kedua novel yang diceritakan di awal tulisan ini, dapat dikatakan menjadi cerminan realitas yang terjadi di Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan, terjadi pula di ruang-ruang sekolah. Oleh karena itu, kesehatan mental murid perlu dijaga bersama-sama.

| bjs.





Filosofi dibalik Wajib Belajar 13 Tahun

Pasti kalian udah sering mendengar tentang Wajib Belajar 13 Tahun yang sedang ramai diperbincangkan? Tapi sebenarnya, apa sih konsep pendidikan baru ini? Yuk, kita kupas tuntas biar kalian paham betul plus bisa menyiapkan strategi menghadapinya!

Dulu kita cuma punya Wajib Belajar 9 Tahun yang mencakup SD sampai SMP. Lalu berkembang jadi 12 Tahun sampai SMA/SMK. Sekarang, pemerintah menambahkan lagi jadi 13 Tahun dengan rincian: 1 tahun pra-sekolah (PAUD wajib), 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA/SMK.

Tapi ini bukan sekadar menambah tahun saja. Ada filosofi penting di baliknya. Ada konsep *Private Return On Investment*, yakni pendidikan harus bisa memberi manfaat konkret buat hidup kita di masa depan, baik dari segi pendapatan maupun kualitas hidup.

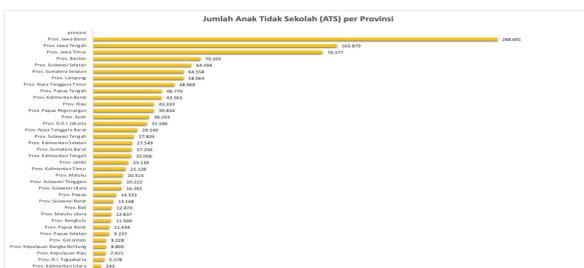
Selain itu, ada pula konsep *Public Return On Investment*, yakni menekankan bahwa pendidikan berkualitas bisa mendongkrak ekonomi negara dan mengurangi kesenjangan sosial.

Wajib Belajar 13 Tahun, menurut Bappenas, melalui komponen 1 tahun pra-sekolah berfokus pada "Setiap anak usia 5-6 tahun wajib berpartisipasi di PAUD sebelum partisipasi di SD", kondisi ini dapat dipenuhi melalui peningkatan akses layanan PAUD, peningkatan ketersediaan sarpras pendidikan, penguatan kebijakan diversifikasi layanan pendidikan, dan peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan.

Namun demikian, sebenarnya mutu pendidikan pun perlu diperhatikan karena sejauh ini akses dan mutu telah berjalan selaras. Adanya perubahan Wajib Belajar dari 9 tahun, 12 tahun, dan sekarang menuju 13 tahun menimbulkan empat urgensi, di antaranya: Pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, yaitu memastikan semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.

Kedua, mendorong Peningkatan Partisipasi Sekolah, yaitu meningkatkan partisipasi siswa dapat mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di masa yang akan datang. Ketiga, mewujudkan Kesetaraan Pendidikan, yaitu

Anak Tidak Sekolah (ATS) per Provinsi



Tantangan Partisipasi Dalam Angka: APS, APK, dan APM





Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun

Agar mendapatkan gambaran yang utuh untuk menerapkan pendidikan bermutu untuk semua, Kemendikdasmen menyusun strategi berdasarkan target sasaran yang terdiri atas empat kelompok yaitu:

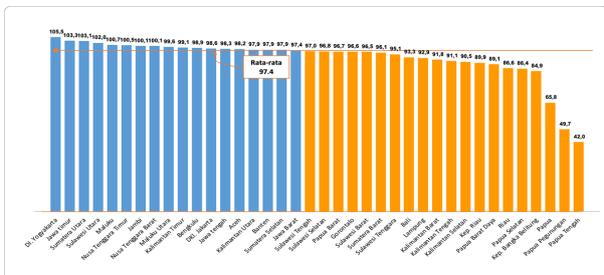
1 Satuan Pendidikan: Berbagai macam program yang menysasar kepada satuan pendidikan.

2 Peserta Didik: Berkaitan dengan kebijakan untuk siswa.

3 Pendidik & Tenaga Kependidikan: Berkaitan dengan ketersediaan & mutu guru.

4 Sistem Pembelajaran: Berkaitan dengan perbaikan sistem dalam meningkatkan mutu.

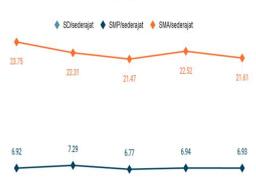
Kondisi Eksisting APK APM Per Provinsi



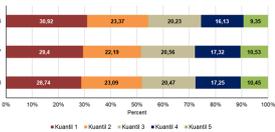
AKSES

Walaupun Kondisi ATS Berkurang, Angka ATS Masih Cukup Tinggi

Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Secara Nasional 2019-2023



Proporsi Anak Tidak Sekolah Usia 16-18 tahun berdasarkan Kelompok Pengeluaran



Sumber : Susenas KOR

- 4,5 juta anak tidak sekolah diantaranya 2,1 juta berusia sekolah SMA/ Sederajat (Angka anak tidak sekolah tertinggi berada pada jenjang SMA/ Sederajat, yaitu sebesar 21,61% pada 2023)
- Diduga 91% Anak Tidak Sekolah dikarenakan bekerja
- Proporsi ATS pada jenjang SMA/ Sederajat lebih dari 50% menengah ke kebawah (Kuintil 1 dan Kuintil 2).

memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa pengaruh faktor latar belakang sosio-ekonomi maupun geografis. Keempat, mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menciptakan masyarakat yang inklusif dan menurunkan kesenjangan.

Melalui urgensi tersebut tercermin bahwa upaya penyediaan aspek pendukung Wajib Belajar 13 Tahun, harus fokus dan berdampak pada peningkatan partisipasi (akses) dan peningkatan kualitas pendidikan (mutu). Sayangnya akses dan mutu dalam menunjang Wajar 13 Tahun masih memiliki hambatan yang disebabkan oleh setidaknya dua faktor, yaitu masih rendahnya akses yang tercermin dalam APS (Angka Partisipasi Sekolah) dan adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Faktor kedua, guru berkualitas yang masih belum tersebar secara merata dan dapat mempengaruhi literasi dan

numerasi.

Oleh karena itu, Kemendikdasmen menghadirkan berbagai program prioritas dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua salah satunya melalui "Wajib Belajar 13 Tahun"

"Pendidikan Bermutu untuk Semua" sebagai Penerjemahan Asta Cita, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya perluasan dan pemerataan akses 1 tahun prasekolah, pendidikan dasar, dan menengah yang bermutu.





Pembelajaran Mendalam Bukan Sekadar Metode



Dulu saya membayangkan beberapa murid SMA duduk di pojok kelas, berdiskusi membahas satu topik dengan asik, penuh semangat sambil sambil tertawa gembira. Murid-murid tersebut sedang dibicarakan topik yang diberikan oleh guru mata pelajaran di kelas. Atau bahkan mereka merencanakan sebuah proyek daur ulang tentang penanggulangan sampah plastik.

Bayangan saya itu sekarang terjadi, ruangan kelas tidak kaku seperti dulu sewaktu saya sekolah di bangku SMA. Ruang kelas menjadi hidup, murid-murid penuh semangat dan yang penting adalah belajar menjadi lebih menyenangkan. Hal ini terjadi berkat pendekatan *deep learning* atau pembelajaran mendalam, sebuah pendekatan yang bukan hanya mengubah cara belajar, melainkan juga dapat melihat konteks secara utuh.

Pembelajaran mendalam bukan metode pembelajaran yang datang secara tiba-tiba, metode ini bukan sekadar “belajar lebih menyentuh esensi” atau “mengulang materi hingga murid-murid menjadi paham.” Lebih dari itu, mengajak murid untuk menyelami materi secara menyeluruh—memahami, menghubungkan, menerapkan, dan bahkan mengkritisi. Murid tidak hanya

menjadi pendengar, tapi pelaku aktif dalam proses belajar.

Sebagai contoh, murid tidak hanya menjawab soal pilihan ganda tentang perubahan iklim, murid justru diajak meneliti fenomena cuaca ekstrem di wilayahnya, mewawancarai warga, dan membuat solusi atau sebuah proyek berbasis data. Pada pelajaran matematika tidak lagi sebatas rumus di papan tulis yang diberikan oleh guru, tapi menjadi alat untuk menghitung kebutuhan energi listrik rumah atau efisiensi sistem irigasi. Bahasa Indonesia bukan lagi sekadar puisi wajib atau analisis cerpen, tapi ruang berekspresi melalui esai, video opini, atau jurnalisme sekolah yang kemudian dipresentasikan bahkan dimuat dalam laman sekolah.

Murid-murid jadi lebih antusias ketika mereka merasa terlibat langsung, pendapat-pendapat dari murid menjadi sangat dibutuhkan dalam konteks proses belajar.





Metode pembelajaran ini sangat berbeda. Tugas yang diberikan oleh seorang guru menjadi lebih variatif dikembangkan oleh murid-murid, dikerjakan dengan penuh kesungguhan serta relevan dengan aktivitas dari murid itu sendiri. Pun halnya dengan guru, memberikan sebuah tugas atau proyek yang dekat dengan murid atau disesuaikan dengan realitas masyarakat di tempat murid berada.

Mengapa Harus Mendalam?

Murid yang notabene beranjak dewasa dapat dikatakan adalah masa kritis dalam pembentukan karakter, nalar,

dan empati. Sayangnya, pendidikan yang hanya berfokus pada angka dan hafalan seringkali gagal menyentuh dimensi ini. Pembelajaran mendalam hadir bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai kebutuhan murid di era sekarang.

Dunia pendidikan tidak dapat mengesampingkan teknologi sekarang yang begitu canggih. Katakanlah kecerdasan buatan. Murid sekarang tidak hanya mengandalkan ingatan, mereka perlu berpikir kritis, berkolaborasi, menyelesaikan masalah, hingga belajar di mana saja dan kapan saja. Kompetensi-kompetensi ini yang sekarang diberikan kepada murid-murid di sekolah.

Banyak literatur menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam dapat meningkatkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, kepercayaan diri, bahkan menjawab tantangan zaman. Murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna, bukan hanya bukan sebatas hafalan dan hitungan semata. Dan yang lebih penting adalah belajar yang menyenangkan.

Menerapkan pembelajaran mendalam bukan perkara mudah, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Akan tetapi, ini menjadi sebuah tantangan yang harus dijalani

oleh seorang guru dan murid. Memang sebuah perubahan dalam sistem dunia pendidikan sebuah keniscayaan, dan ini dilakukan untuk kebutuhan murid yang lebih baik lagi.

Tantangan yang sangat terasa adalah sumber daya guru dan fasilitas yang terdapat di satuan pendidikan, masih terasa timpang. Apalagi satuan pendidikan yang berada di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dibutuhkan kerja keras untuk transformasi dan sosialisasi terkait pendekatan mendalam ini.

Meski demikian, semangat untuk berubah terus tumbuh. Banyak guru mulai membentuk komunitas belajar, saling berbagi praktik baik, hingga menciptakan kurikulum adaptif berbasis proyek, memberikan ruang lebih luas untuk eksplorasi, kreativitas, dan kontekstualisasi dunia pembelajaran.

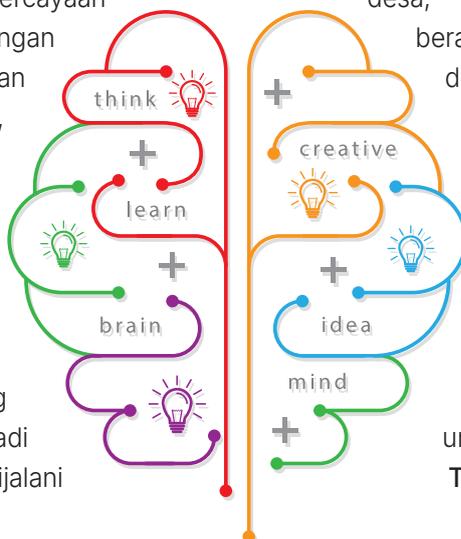
Kelas-kelas yang menerapkan pembelajaran mendalam biasanya tampak lebih hidup. Siswa berdiskusi dalam kelompok, menggali sumber dari internet atau lapangan, mencatat di papan tulis kecil, hingga membuat pameran hasil kerja mereka.

Di satu sekolah di Malang, siswa membuat proyek tentang ketahanan pangan lokal. Mereka meneliti jenis-jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di halaman rumah, bekerja sama dengan petani, bahkan membuat kampanye digital untuk mendukung gerakan *urban farming*. "Kami belajar banyak hal sekaligus. Biologi, ekonomi, komunikasi, dan juga empati," kata Bagas, siswa kelas XII yang terlibat dalam proyek itu.

Di sekolah lain di Aceh, guru IPS mengajak siswa membuat simulasi rapat dewan desa untuk membahas penanggulangan banjir. Anak-anak berperan sebagai warga, tokoh adat, pejabat desa, dan relawan. Mereka belajar berargumentasi, menyusun kebijakan, dan memahami realitas sosial yang kompleks.

Pembelajaran mendalam bukan hanya soal metode. Pembelajaran mendalam adalah soal memanusiakan proses belajar. Dan sekolah, lebih dari sekadar bangunan, adalah tempat paling mungkin untuk perubahan itu dimulai.

Tabik.



Bahasa Indonesia: Anak Gaul dari Campuran 1.000 Bahasa?



Bonjour

Jika bahasa itu manusia, bahasa Indonesia mungkin bahasa yang paling fleksibel karena mudah beradaptasi, mudah bergaul, dan dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan tanpa kehilangan identitasnya. Ia memiliki kemampuan untuk bersikap sopan di upacara kenegaraan, tetap tenang saat nongkrong di warung kopi, dan bahkan menjadi lucu saat bermain di media sosial. Bahasa Indonesia menunjukkan sejarah panjang berbagai budaya yang membentuk bangsa ini, selain sarana komunikasi.

Uniknya, mayoritas penduduk kita tidak berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahasa Melayu telah lama digunakan sebagai *lingua franca* di Nusantara, terutama dalam perdagangan. Bahasa Melayu akhirnya

dipilih sebagai dasar bagi bahasa pemersatu bangsa yang kelak kita kenal sebagai Bahasa Indonesia karena sifatnya yang sederhana, luwes, dan mudah dimengerti. Keputusan ini dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, dan setelah kemerdekaan Indonesia, dikukuhkan secara resmi.

Kemampuan untuk menyerap dan mengadaptasi elemen dari berbagai bahasa adalah salah satu kekuatan terbesar bahasa Indonesia. Banyak istilah penting tentang budaya dan pemerintahan berasal dari bahasa Sanskerta, seperti "negara", "bahagia", dan "raja". Istilah-istilah seperti "akhirat", "makhluk", dan "izin" berasal dari bahasa Arab. Selama tiga abad lebih sebagai negara penjajah, Belanda meninggalkan kosa kata administratif seperti "kantor", "polisi", dan "setrika", bersama dengan kosa kata Portugis seperti "gereja" dan "mentega", dan kosa kata Tionghoa seperti "pisau" dan "loteng".

Yang menarik adalah bahwa kata-kata serapan ini tidak otomatis ada dengan sendirinya; mereka juga mengalami perubahan untuk sesuai dengan lidah dan sistem ejaan kita. Bahasa Indonesia dapat mengubah kata dan bunyi dengan mudah, sehingga "administratie" dari Belanda menjadi "administrasi" yang lebih mudah diucapkan oleh kita. Bahkan dalam situasi yang tidak formal, kata-kata asing seperti "check-in" dapat berubah menjadi "cekin". Hal ini menunjukkan kemampuan Masyarakat kita untuk mengubah bahasa sehingga bisa memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari. Proses ini menunjukkan bahwa bahasa adalah makhluk hidup yang tumbuh bersama penggunaannya daripada benda mati.

Namun, keterbukaan dan kemudahan bergaul ini juga memiliki tantangan tersendiri. Satu sisi, menggabungkan berbagai bahasa bisa memperkaya kosa kata dan memungkinkan kita memahami konsep-konsep di seluruh dunia dengan cepat. Sebaliknya, menggunakan kata serapan secara berlebihan tanpa memahami artinya dalam bahasa Indonesia dapat mengaburkan bentuk asli bahasa tersebut.

Tantangan ini sebenarnya bukan ajakan untuk menjadikan kita kaku dan menghindari penggunaan istilah asing. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk membentuk pemahaman kita untuk tahu kapan menggunakan kata "deadline" dan kapan memilih kata "batas waktu". Literasi bahasa mencakup lebih dari sekedar kemampuan menulis dan membaca; itu juga mencakup rasa bahasa, yaitu kemampuan untuk memilih kata yang tepat, menyusun kalimat yang efektif, dan memahami bagaimana bahasa digunakan. Semakin mahir seseorang dalam menggunakan bahasa, semakin baik mereka berkomunikasi dan menyampaikan ide.

Bahasa Indonesia menunjukkan perjalanan bangsa kita sebagai bangsa yang plural. Sebagai anak gaul dengan teman seribu bahasa, bahasa Indonesia perlu dijaga agar tidak kehilangan arah. Caranya sederhana: gunakan bahasa dengan hati-hati, pelajari nilainya, dan terus mengeksplorasi kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sejarah, budaya, dan semangat kebangsaan melekat dalam setiap kata yang kita ucapkan atau tulis. Karena itu, menjaga bahasa Indonesia bukan hanya tanggung jawab Guru Bahasa Indonesia; itu adalah tanggung jawab kita semua. | *AR01





Belajar Bukan untuk Nilai, Melainkan untuk Kehidupan:

Mengapa Literasi Itu Penting?

Sering kali peserta didik memandang belajar sebagai kewajiban untuk mendapatkan nilai baik di rapor atau sekadar memenuhi ekspektasi orang tua dan guru. Tidak sedikit pula yang merasa bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencapai angka-angka tertentu demi kelulusan atau prestasi akademik. Pandangan ini, meskipun umum, sesungguhnya membatasi makna sejati dari proses belajar itu sendiri. Pendidikan, pada hakikatnya, bukan hanya tentang nilai, melainkan tentang bagaimana seseorang dapat memahami dunia dan menjalani hidup secara lebih cerdas dan bermakna.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai bentuk informasi dan persoalan yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Misalnya, ketika membaca deskripsi produk sebelum membeli barang secara daring, memahami berita dari berbagai media sosial, atau menilai argumentasi dalam konten video yang beredar luas. Kemampuan untuk menyaring informasi, menguji kebenarannya, serta menggunakannya secara tepat adalah bagian dari kompetensi yang disebut sebagai literasi.

Literasi tidak semata-mata tentang bisa membaca dan menulis secara teknis. Literasi mencakup kemampuan untuk memahami makna, menganalisis informasi, mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman hidup, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman tersebut. Maka dari itu, membaca teks bukan hanya soal mengeja kata demi kata, melainkan





juga memahami konteks, menangkap pesan tersembunyi, dan meresponsnya secara cerdas.

Dalam bukunya *The Smartest Kids in the World*, Amanda Ripley menelusuri pengalaman pelajar Amerika yang mengikuti program pertukaran pelajar ke tiga negara: Finlandia, Korea Selatan, dan Polandia. Mereka menemukan bahwa sistem pendidikan di negara-negara tersebut tidak selalu mengandalkan hafalan atau ujian berulang, melainkan menekankan pada pembelajaran yang bermakna, pemecahan masalah, serta kemandirian berpikir. Di Finlandia misalnya, siswa diajak untuk berdiskusi, menyusun pendapat, dan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga fasilitator pembelajaran kritis.

Menariknya, negara-negara dengan sistem pendidikan seperti itu justru memperoleh hasil tinggi dalam survei literasi global seperti PISA (*Programme for International Student Assessment*), yakni sebuah penilaian yang menguji kemampuan siswa usia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains dengan pendekatan *problem solving*. PISA tidak menilai seberapa banyak siswa menghafal rumus, melainkan seberapa jauh mereka mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan nyata. Dan hasilnya, negara-negara seperti Finlandia dan Korea Selatan konsisten berada di peringkat atas, sementara banyak negara lain, termasuk Indonesia, masih tertinggal jauh.

Hasil tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh besarnya anggaran pendidikan atau fasilitas canggih. Ripley menunjukkan bahwa perubahan pendidikan bisa terjadi dalam satu generasi, asalkan ada kejelasan tujuan, peran guru yang profesional,

dan budaya belajar yang mendorong siswa berpikir, bukan hanya mengejar nilai. Negara-negara dengan skor tinggi pada PISA justru tidak selalu memiliki waktu belajar terlama, melainkan sistem yang mendorong siswa untuk berpikir mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya.

Apa implikasinya bagi kita? Kita perlu memandang literasi sebagai bagian penting dari kesiapan hidup, bukan sekadar tuntutan akademik. Literasi membantu kita memahami dunia yang kompleks, membuat keputusan yang bijak, serta menjadi warga negara yang aktif dan sadar. Dalam era digital yang penuh informasi, kemampuan membedakan fakta dan opini, memahami pesan visual maupun teks, serta berargumen secara logis menjadi keterampilan yang tidak bisa ditawar.

Oleh karena itu, mari kita ubah cara pandang terhadap belajar. Belajar bukan hanya soal mengerjakan soal atau menghafal materi untuk ujian. Belajar adalah proses membentuk diri, memperluas cara pandang, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan kehidupan. Nilai boleh menjadi salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya tujuan.

Mari kita tanamkan dalam diri bahwa literasi adalah bekal hidup. Belajarlah bukan untuk nilai, melainkan untuk menjadi manusia yang berpikir, peduli, dan siap menghadapi masa depan. | *AR04



Fenomena Judul

Mainan Kata atau Manipulasi Emosi?



Bayangkan kamu sedang *scrolling* media sosial, lalu muncul judul seperti, “Gak Nyangka Dia Lakukan Ini Sebelum Ujian Nasional!” atau “5 Rahasia Kamu Belum Tahu soal Hidup Sehat!”—langsung bikin penasaran kan? Dari kalimat paling sederhana, judul itu seperti pemikat yang bikin kita tergoda untuk mengklik. Inilah fenomena clickbait, strategi yang memanfaatkan rasa ingin tahu (*curiosity gap*) dan emosi pembaca agar mereka rela mengeklik konten yang belum tentu sesuai ekspektasi.

Secara psikologis, clickbait sering menanamkan rasa penasaran melalui judul yang terasa menggantung; memancing kita merasa “harus tahu.” Pengkondisian ini memanfaatkan ketika kita menyadari ada “celah informasi” antara apa yang kita tahu dan apa yang ingin kita ketahui, otak kita jadi gelisah dan merasa perlu mengisi kekosongan itu. Strategi ini berhasil karena judul clickbait sering dibungkus dengan kalimat provokatif, hiperbola, atau pertanyaan menggoda—teknik yang terbukti menimbulkan keterlibatan emosional, seperti rasa kaget, marah, atau penasaran.

Namun, menariknya, masyarakat memberikan penilaian buruk kepada media yang menggunakan clickbait, seperti membuat judul-judul bombastis tetapi tidak sesuai dengan isi beritanya. Sebuah studi menemukan bahwa

Sebagian besar masyarakat sudah tidak mempercayai lagi media massa. Salah satu penyebabnya adalah clickbait tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian pengusaha media massa saat ini.

Di Indonesia, penggunaan clickbait pun semakin meningkat, terutama di media daring. Dalam pemberitaan Pilpres 2024, sejumlah media kerap memanfaatkan judul clickbait untuk menarik perhatian Masyarakat. Strategi tersebut menimbulkan risiko misleading atau memicu kesalahpahaman. Studi lain mengungkap persepsi yang kompleks: wartawan menyadari clickbait sebagai “judul jebak”—sangat efektif untuk meningkatkan trafik, tapi bila disalahgunakan bisa merusak kredibilitas dan kepercayaan pembaca.

Dalam jurnal akademik, ditemukan model untuk mendeteksi clickbait menggunakan algoritma bahasa, misalnya M-BERT yang dipakai di Indonesia. Model ini menunjukkan akurasi sangat tinggi—sekitar 91 %—artinya secara teknis, clickbait bisa dikenali secara otomatis. Namun riset juga mengingatkan, teknologi deteksi tidak cukup; kita butuh literasi kritis agar pembaca tidak hanya tergoda klik, tapi juga selektif dan sadar dalam menilai kualitas konten.

Untuk kita yang aktif di media sosial dan sering membaca berita daring, fenomena clickbait ini jadi pelajaran penting. Pertama, ketahuilah teknik mereka: judul menggantung, bahasa hiperbola, listicles bombastis—itu semua bentuk manipulasi emosi. Kedua, latihlah kemampuan membaca kritis: cek sumber, baca isi sebelum membagikan, dan hindari menyebar berita hanya berdasar judul. Ketika kita bisa mengenali clickbait, kita juga jadi pengguna media yang lebih dewasa dan bertanggung jawab.

Akhirnya, fenomena judul clickbait bukan sekadar permainan kata, tetapi wujud manipulasi psikologis lewat bahasa. Ia bisa jadi alat marketing yang ampuh, tapi juga bisa merusak kredibilitas informasi dan kepercayaan publik. Para jurnalis, pembuat konten, dan pembaca muda semacam kamu punya peran besar: menggunakan clickbait secara etis, dan bila tidak sesuai, jangan ragu meninggalkannya. Dengan begitu, kita sama-sama menjaga agar informasi tetap bernilai, bukan cuma sensasi. | *AR02





Nilai Kejujuran dalam Budaya Baduy Warisan Leluhur untuk Karakter Bangsa



Konsep kejujuran dalam budaya Baduy tidak diajarkan dalam bentuk ceramah atau pelajaran di kelas, namun dibiasakan melalui setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

// *Gunung teu meunang dilebur, lembah teu meunang diruksak*". Aturan ini merupakan salah satu bentuk kearifan budaya masyarakat Baduy. Dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut dapat diartikan bahwa gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak.

Bagi masyarakat yang hidup di kaki gunung Kendeng ini, aturan ini mengajarkan mereka untuk tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan dan tidak menipu bumi demi keuntungan pribadi. Sejatinya, aturan ini merupakan cermin kejujuran terhadap alam. Cara mereka hidup yang selaras dengan alam adalah bentuk kejujuran yang paling awal—jujur pada sumber kehidupan itu sendiri.

Kejujuran bagi masyarakat Baduy menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan keseharian mereka. Nilai ini menjadi langka dalam kehidupan modern. Bagi sebagian masyarakat kota, kejujuran seolah hanya dapat diucapkan, namun sulit untuk dijalankan. Pada realitas keseharian, kejujuran tidak lagi dianggap sebagai kekuatan, melainkan kelemahan yang membuat mereka yang jujur sering kalah cepat oleh yang pandai memanipulasi. Padahal, jika kita mau menengok akar budaya bangsa, ada banyak komunitas adat yang menegakkan kejujuran sebagai prinsip hidup yang paling utama, bahkan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contohnya adalah masyarakat Baduy di pedalaman Banten.





Masyarakat Baduy adalah potret langka dari kehidupan yang berpijak kuat pada nilai-nilai moral dan integritas. Mereka menolak “modernisasi” bukan karena anti kemajuan, melainkan karena ingin menjaga harmoni dengan alam dan nilai-nilai luhur yang telah menghidupi mereka selama ratusan tahun.



Masyarakat Baduy adalah potret langka dari kehidupan yang berpijak kuat pada nilai-nilai moral dan integritas. Mereka menolak “modernisasi” bukan karena anti kemajuan, melainkan karena ingin menjaga harmoni dengan alam dan nilai-nilai luhur yang telah menghidupi mereka selama ratusan tahun. Dalam kehidupan mereka, tidak ada tempat bagi kepalsuan. Ucapan dan tindakan harus satu kata, dan kepercayaan menjadi mata uang paling berharga. Ketika janji diucapkan, maka ia harus ditepati. Ketika diberi amanah, maka akan dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa mengeluh.

Konsep kejujuran dalam budaya Baduy tidak diajarkan dalam bentuk ceramah atau pelajaran di kelas, namun dibiasakan melalui setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, anak-anak Baduy sudah melihat dan mengalami bagaimana orang-orang dewasa menjalani hidup dengan memegang teguh nilai-nilai kejujuran secara konsisten. Mereka belajar bahwa hidup yang lurus bukan hanya membuat hati





tenang, melainkan juga mengundang penghormatan dari sesama. Tidak ada sistem hukuman yang rumit, karena pengawasan dilakukan oleh hati nurani dan tatanan adat yang dijaga bersama. Dalam komunitas yang begitu saling percaya, tidak ada tempat untuk kebohongan.

Bentuk kearifan lokal lainnya yang juga memperkuat karakter jujur di kalangan masyarakat Baduy adalah kerja sama atau gotong royong yang dikenal sebagai *rereongan*. Kegiatan seperti membangun rumah, memperbaiki jalan, atau menanam padi dilakukan bersama tanpa pamrih. Melalui *rereongan*, nilai kejujuran tumbuh karena setiap orang memberikan tenaga sesuai kemampuannya, tanpa berpura-pura bekerja atau mengambil pujian yang bukan haknya. Budaya kolektif ini membentuk karakter sosial yang saling percaya dan jauh dari praktik manipulatif. *Rereongan* bukan hanya tradisi kerja, melainkan juga latihan kejujuran dalam bertindak dan bersikap.

Ketaatan pada hukum adat juga menjadi fondasi karakter masyarakat Baduy. Mereka menjunjung tinggi warisan leluhur atau *pikukuh karuhun*, yakni aturan-aturan adat yang diturunkan dari generasi ke

generasi. Hukum adat ini dijalankan bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran. Semua warga, dari anak-anak hingga orang tua, termasuk pemimpin adat yang disebut *Pu'un*, tunduk pada prinsip ini. Pelanggaran terhadap *pikukuh* tidak hanya dianggap salah secara hukum, tapi juga sebagai bentuk ketidakjujuran terhadap jati diri dan komunitas.

Kesederhanaan dan kemandirian adalah wajah lain dari kejujuran dalam kehidupan Baduy. Mereka hidup dari hasil bertani atau *ngahuma*, dan menyimpan hasil panennya di lumbung padi keluarga yang biasa disebut *leuit*. Praktik ini melambangkan kecukupan dan kontrol diri. Masyarakat Baduy tidak mau mengandalkan bantuan luar, tidak serakah, dan mereka tidak berlomba-lomba menumpuk harta. Kejujuran dalam konteks ini berarti tahu batas, tahu cukup, dan menolak tipu muslihat demi kekayaan semu. Ini pelajaran penting bahwa karakter tidak dibangun dari kemewahan, tapi dari kemampuan menjaga diri untuk tidak berlebih-lebihan.

Budaya musyawarah juga menjadi praktik harian dalam masyarakat Baduy. Salah satu sistem demokratis khas mereka dikenal sebagai *tangtu*





tilu jaro tujuh, yakni struktur kepemimpinan dan permusyawaratan yang dijalankan dengan rasa hormat dan tanpa intrik. Pemimpin tidak dipilih karena janji manis, tetapi karena integritas yang telah terbukti. Proses ini tidak mengandalkan kampanye atau kompetisi, tapi didasarkan pada mufakat yang lahir dari kepercayaan. Di sini, kejujuran menjadi prasyarat utama dalam memimpin dan dipimpin.

Nilai pekerja keras juga melekat dalam keseharian masyarakat Baduy. Mereka bangun pagi untuk bertani, membuat kerajinan, atau berjalan kaki jauh untuk berdagang hasil alam. Tidak ada kata malas dalam kamus hidup mereka, dan tidak ada jalan pintas untuk memperoleh rezeki. Hidup yang dijalani dengan usaha nyata menjadi bukti bahwa kejujuran juga berarti tidak mencuri waktu dan tidak mengambil hak orang lain dengan bermalasan. Dalam masyarakat ini, kerja adalah ibadah, dan hasilnya adalah ketenangan batin, bukan hanya kekayaan lahir.

Nilai-nilai ini sangat relevan dengan apa yang kita pahami sebagai karakter. Dalam pengertian saat ini, karakter adalah ciri khas yang membuat seseorang konsisten dalam bersikap dan bertindak, tanpa tergantung situasi. Kejujuran, dalam hal ini, merupakan fondasi dari karakter yang kuat. Seperti dijelaskan dalam banyak literatur pendidikan karakter, jujur bukan hanya berkata benar, melainkan juga berani mengakui kesalahan dan bertindak sesuai hati nurani meskipun sulit. Pendidikan karakter sejati harus menyentuh wilayah afektif dan psikomotorik, bukan hanya pengetahuan tentang benar dan salah.

Untuk itu, kita harus menjaga pendidikan hari ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja.

Jangan sampai kita tahu definisi jujur, bisa menghafal ayat atau kutipan bijak tentang kejujuran, tapi belum tentu mempraktikkannya dalam hidup nyata. Di sinilah kita perlu belajar dari praktik kehidupan masyarakat adat seperti Baduy. Mereka tidak berbicara tentang integritas dalam seminar, tapi menjalaninya dalam kehidupan. Dalam budaya Baduy, orang tidak diajarkan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi hidup selaras dan tidak merugikan orang lain. Mereka percaya bahwa keberkahan hidup terletak pada ketulusan menjalankan peran masing-masing dengan jujur dan ikhlas.

Kita tidak harus meniru cara hidup Baduy sepenuhnya. Namun kita bisa mengadopsi prinsip-prinsip mereka yang telah teruji oleh waktu. Kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kesetiaan pada komunitas adalah fondasi yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk bertumbuh secara sehat. Nilai-nilai ini bisa dihidupkan kembali di sekolah, keluarga, dan masyarakat jika ada kesadaran kolektif untuk menjadikan karakter sebagai prioritas. Pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus mencakup pembentukan watak.

Maka, menggali nilai kejujuran dari budaya Baduy bukan sekadar studi antropologis atau romantisme masa lalu. Ini adalah strategi nyata untuk membangun masa depan. Kejujuran adalah energi sosial yang memperkuat kepercayaan, memperkuat sistem, dan mengurangi kerusakan. Ketika seseorang jujur, ia dipercaya. Ketika kepercayaan menjadi budaya, maka masyarakat akan menjadi kuat. Seperti kata pepatah: jujur pangkal selamat, dan dalam konteks bangsa, kejujuran adalah jalan menuju kemajuan yang bermartabat. | *AR05



Belajar Keberanian dan Kejujuran dari Muhammad Husni Thamrin

Muhammad Husni Thamrin tahu bahwa bangsa yang besar dibangun dari kebenaran. Dalam dirinya, kita belajar bahwa kejujuran bukan hanya soal berkata benar, melainkan juga tentang memilih jalur yang lurus meski penuh kerikil.

Jika ada satu kata yang menggambarkan sosok Muhammad Husni Thamrin, maka kata itu adalah “teguh.” Teguh pada bangsa. Teguh pada suara hati. Dan yang terpenting, teguh pada kebenaran. Di masa ketika banyak orang memilih diam demi kenyamanan, Thamrin memilih untuk bersuara, walau itu berarti hidupnya diawasi, dicurigai, bahkan direnggut. Baginya, kejujuran bukan pilihan idealis, melainkan kewajiban moral yang tidak bisa ditawar.

Di awal abad ke-20, Batavia sedang bergolak. Ketidakadilan menyesak. Rakyat dipungut pajak tanpa ampun, buruh dibayar rendah, dan bangsa sendiri hanya menjadi tamu di negerinya. Di tengah situasi ini, Thamrin—anak Betawi dari keluarga terpandang—justru turun ke jalan perjuangan, bukan dalam bentuk perlawanan bersenjata, melainkan lewat jalan yang lebih sunyi dan berbahaya: jalur politik. Ia percaya, perubahan bisa dimulai dari dalam sistem, asalkan dilakukan dengan hati jujur dan tujuan yang lurus.

Dalam sidang-sidang Volksraad, Thamrin tidak hanya duduk manis dan berdiam diri. Sebagai anggota, ia justru lantang menyuarakan kepentingan rakyat. Tentu saja suara Thamrin membuat ketenangan rezim terusik. Dalam setiap sidang, Thamrin, dengan kalimat menohok mempertanyakan ketimpangan,





menyuarakan penderitaan rakyat kecil, dan menuntut agar pemerintah kolonial berhenti berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Ia tidak membungkus kritik dengan basa-basi. Kejujurannya kadang membuat gusar lawan, tapi sekaligus mengundang hormat. Ia tidak sekadar cerdas berbicara, tapi konsisten menjalankan apa yang ia yakini benar.

Kejujuran Thamrin terasa sangat manusiawi. Ia tidak lahir dari slogan, tapi dari pilihan-pilihan sunyi yang tidak selalu populer. Ia tidak hidup dalam romantisme pahlawan yang dielu-elukan, tetapi dalam tekanan politik yang nyata. Hidupnya dipantau, geraknya dibatasi, bahkan organisasi yang ia dirikan, Parindra, pun diawasi ketat. Tapi semua itu tidak menggoyahkan prinsipnya. Ia tetap mengangkat suara, walau tahu risikonya bisa sampai mati. Dan itu benar-benar terjadi—Thamrin wafat mendadak dalam situasi yang penuh kecurigaan, setelah dituduh berhubungan dengan Jepang dan diawasi secara intens oleh intel Belanda.

Dari mana datang kekuatan semacam itu? Jawabannya ada pada nilai-nilai yang tertanam kuat dalam dirinya yaitu keadilan, keberpihakan, dan tentu saja, kejujuran. Thamrin tahu bahwa kejujuran bukan berarti selalu aman. Tapi ia juga tahu bahwa bangsa yang besar tidak dibangun dari kebohongan yang rapi, melainkan dari kebenaran yang kadang menyakitkan. Dalam dirinya, kita belajar bahwa kejujuran bukan hanya soal berkata benar, melainkan juga tentang memilih jalur yang lurus meski penuh kerikil.

Hari ini, ketika banyak orang muda kehilangan panutan, sosok seperti Thamrin perlu diperkenalkan ulang. Bukan sebagai patung di taman atau nama jalan di ibu kota, melainkan sebagai manusia yang berani jujur di tengah

tekanan. Ia bukan pahlawan tanpa cela, tetapi justru karena itulah ia layak diteladani. Ia tidak sempurna, tapi selalu setia pada apa yang diyakininya benar. Ia mengajarkan kita bahwa jujur itu tidak instan. Ia tumbuh dalam kesadaran, teruji dalam tekanan, dan diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya ucapan.

Pendidikan karakter hari ini jangan sampai terjebak pada indoktrinasi. Anak-anak jangan hanya diminta menghafal nilai kejujuran, tapi harus diajak melihat bagaimana kejujuran itu hidup dalam sejarah. Thamrin adalah jembatan dari nilai ke praktik. Ia bisa menjadi tokoh yang dihidupkan kembali lewat cerita, drama kelas, proyek sejarah, bahkan diskusi terbuka di komunitas. Ketika nilai bertemu narasi, dan narasi menyentuh emosi, maka karakter tumbuh bukan sebagai hafalan, melainkan sebagai sikap.

Lebih jauh lagi, nilai kejujuran dari Thamrin bisa menjadi sumber refleksi bagi para pemimpin masa kini. Dalam dunia politik yang sering penuh sandiwara, Thamrin adalah pengingat bahwa kepercayaan rakyat bukan dibeli dengan citra, melainkan dibangun lewat integritas. Ia menunjukkan bahwa keberanian berkata benar lebih berdampak daripada kepandaian berbicara. Bahwa memilih tidak korup lebih revolusioner daripada membuat seribu janji. Dan bahwa menjadi pemimpin itu pertama-tama soal jujur pada diri sendiri.

Tentu kita tidak sedang berharap semua orang menjadi Thamrin. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil dengan berani berkata benar, berani mengoreksi diri, dan berani menolak kebohongan walau datangnya dari orang terdekat kita. Kita bisa belajar bahwa kejujuran bukan warisan genetik, melainkan keputusan yang mesti kita ambil setiap hari. Muhammad Husni Thamrin—yang pernah berdiri sendirian di ruang sidang kolonial demi membela rakyat, tanpa pernah sekalipun menjual hatinya, adalah sosok yang patut menjadi contoh. | *Ar06



Urgensi Tes Kemampuan Akademik bagi Murid SMA

Mencermati Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tes Kemampuan Akademik, bahwa sebagai bagian dari kewajiban menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara diperlukan standar untuk mengetahui capaian akademik murid mengacu pada standar nasional pendidikan. Tujuan dari TKA adalah untuk memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu menyiapkan perangkat yang baik dalam melaksanakan perubahan yang terjadi pada dunia pendidikan.

Perubahan dinamika dunia pendidikan menjadi sebuah keniscayaan, dan ini telah tertuang dalam peraturan menteri. TKA sendiri sudah pasti telah dianalisis terlebih dahulu dan sesuai dengan visi dan misi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pendidikan yang bermutu.

Namun, banyak pertanyaan mencuat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental pelajar. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah tes semacam itu justru menjadi beban psikologis bagi siswa, ataukah tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan yang berkualitas?.

Apabila dilihat dari perspektif yang lebih konverhensif, TKA justru memiliki urgensi yang besar dalam dunia pendidikan, terutama di SMA. Dengan catatan, TKA dilakukan secara proporsional dan manusiawi.

TKA merupakan alat ukur objektif yang dapat membantu sekolah, guru, dan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Di tengah beragam metode pembelajaran dan kualitas sekolah yang tidak merata, kehadiran tes dengan standar nasional memberi pegangan dalam menilai capaian pembelajaran. TKA menjadi semacam "peta" untuk melihat posisi dan progres murid dalam proses akademiknya.

Di tingkat SMA, tes kemampuan akademik juga berperan penting sebagai jembatan menuju jenjang berikutnya. Seperti seleksi masuk perguruan tinggi misalnya. TKA menjadi komponen utama dalam menilai kesiapan intelektual murid menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Tanpa sistem yang terstandar, perguruan tinggi akan kesulitan

menemukan dasar penilaian yang adil dan transparan di tengah ribuan calon mahasiswa dari latar belakang sekolah yang sangat beragam.

Lebih jauh lagi, TKA juga membantu murid belajar menghadapi tekanan dan tantangan secara terukur. Murid dibiasakan menghadapi tantangan akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh (bukan dalam tekanan), tetapi dalam pemahaman bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

Namun tidak bisa menutup mata, bahwa TKA juga bisa menjadi pemicu tekanan mental apabila tidak dikelola dengan baik dan arif. Banyak murid memiliki tekanan dengan hasil ujian. Pada konteks ini, nilai bukan lagi sekadar angka, melainkan simbol penerimaan sosial, terutama oleh guru, orang tua, bahkan oleh murid itu sendiri. Di sinilah letak tantangan besar pendidikan, bagaimana menjaga keseimbangan antara penilaian akademik dan kesehatan psikologis siswa.

Urgensi TKA tidak berarti bahwa tes harus menjadi satu-satunya alat ukur. Justru, dalam konteks pendidikan modern yang lebih baik, kehadiran TKA perlu diimbangi dengan bentuk-bentuk lain, seperti evaluasi alternatif seperti portofolio, proyek kreatif, presentasi, dan refleksi diri. Tes bukanlah hantu yang menakuti, melainkan cermin yang membantu murid melihat kekuatannya dan mengenali potensi yang perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, urgensi TKA di SMA harus dilakukan, selama mampu mengatur perannya secara proporsional. TKA penting, tapi bukan nilai yang final. TKA sangat berguna, tapi tidak boleh membunuh semangat murid. Pendidikan harus berani melihat lebih luas, bahwa keberhasilan murid bukan hanya tampak dari ujian, tetapi juga dari kemampuannya berpikir kritis, bersikap jujur, bekerja sama, dan menjaga karakter murid itu sendiri.

Maka, tugas guru, orang tua, dan pembuat kebijakan adalah bukan menghapus ujian, melainkan menempatkan ujian dalam kerangka yang sehat dan mendidik. Dengan begitu, TKA bukan hanya menjadi alat evaluasi, tapi juga menjadi bagian dari proses pertumbuhan murid secara intelektual maupun emosional.

Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal siapa yang paling tinggi nilainya, tetapi siapa yang paling siap menjalani hidup. Dan hal tersebut hanya akan dicapai oleh pendidikan yang bermutu, seperti yang dicita-citakan oleh Menteri Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah Republik Indonesia. ● bjs

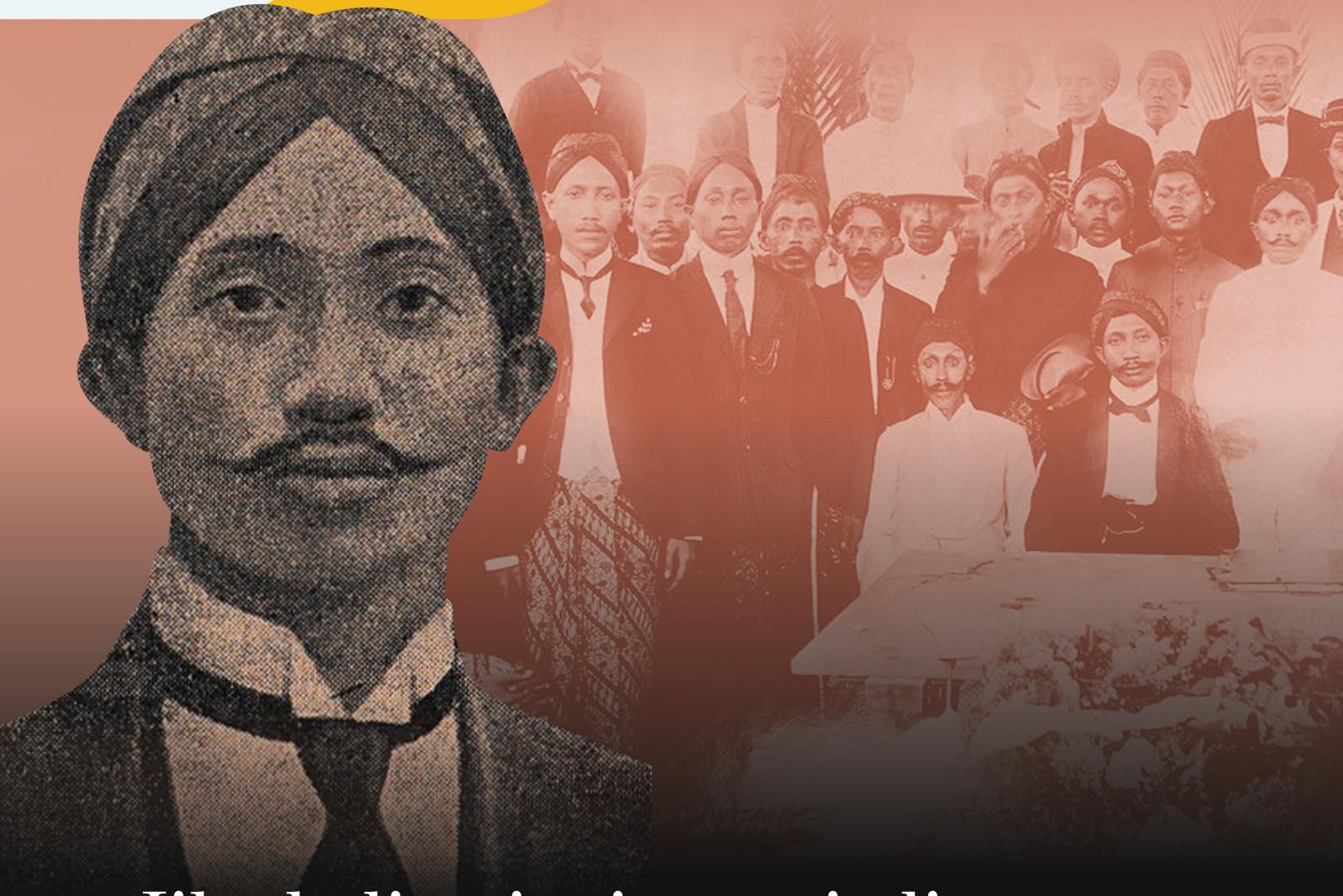
“ Belajar tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan kritis untuk menganalisis dan memahami dunia.”

Paulo Freire



Direktorat Sekolah Menengah Atas
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH





Jika kalian ingin menjadi
Pemimpin besar, menulislah
seperti wartawan dan
bicaralah seperti orator.

Hadji Oemar Said Tjokroaminoto

Direktorat Sekolah Menengah Atas
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



Direktorat SMA



direktorat.sma



direktoratsma



Direktorat SMA



direktoratsma



www.sma.kemdikbud.go.id